

POLITIK LINGKUNGAN

(Studi terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Makassar terhadap Ruang
Terbuka Hijau)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana (S.Sos.)
Jurusan Ilmu Politik Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

USMAN ALI
NIM: 30600113116

FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Usman Ali
Nim : 3060011116
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Judul : Politik Lingkungan (Studi terhadap Kebijakan Pemerintah

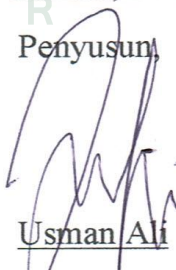
Kota Makassar terhadap Ruang Terbuka Hijau)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagianatauseluruhnya, maka skripsi ini dangelar yang diperoleh karnanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata, 14 Maret 2018

Penyusun


Usman Ali

Nim: 30600113116

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “POLITIK LINGKUNGAN (Studi terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Makassar terhadap Ruang Terbuka Hijau)”, yang disusun oleh Usman Ali, NIM: 30600113116, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 M, bertepatan dengan 12 Rajab 1439 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

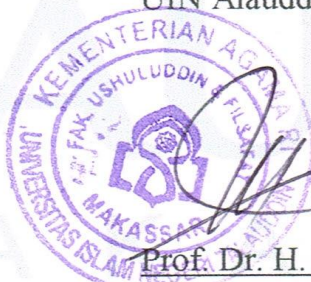
Samata Gowa, 06 Juni 2018 M.
21 Ramadhan 1439 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Mahmuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Syahrir Karim, M.Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Natsir Siola, MA.	(.....)
Munaqisy II	: Syahrir Karim, M.Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Syarifuddin Jurdi, M. Si	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Ridha, M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Muth. Natsir, MA.

NIP: 195907041989031003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Syukur Alhamdulillah, Segala puji hanya kepada Allah penulis haturkan yang telah memberikan begitu banyak sekali nikmat kepada penulis diantaranya nikmat kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui beberapa proses yang sangat panjang mulai dari proses belajar, bimbingan, penelitian, sampai kepada pengujian skripsi penulis dengan judul *Politik Lingkungan* (Studi terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Makassar terhadap Ruang Terbuka Hijau) yang mana skripsi ini merupakan syarat akademisi untuk menyelesaikan pendidikan jenjang strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menjumpai hambatan dan tantangan namun dengan kekuatan doa dan dukungan dari orang-orang yang terkasihlah yang penulis jadikan acuan untuk terus maju hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu penulis mengharapkan motivasi, dukungan, semangat, kritik, dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga dan sembah sujud kepada Allah Swt yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa menjadi

inspirasi dalam hidup saya sehingga saya memiliki kemauan untuk menuntut ilmu lebih tinggi yaitu :

1. kepada kedua orang tua saya ayahanda M. Ali dan ibunda Hasna yang telah, melahirkan, mendidik, membesarkan dan mengiringi setiap langkah penulis hingga saat ini, dengan doa tulus dan tak henti-hentinya serta dukungan-dukungannya baik secara moril maupun materi, kepada kakak penulis Suwardi dan kedua adik Ahmad Kurnia dan Ahriani beserta Keluarga Besar yang telah memberikan semangat tersendiri kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Natsir Siola, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan ilmu politik
4. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik.dan Bapak Syahrir Karim, S.Ag, M.Si, Ph.D selaku Sekertaris Jurusan dan Selaku Pembimbing I
5. Bapak Prof. Dr. H. Natsir Siola, MA selaku penguji 1
6. Bapak Syahrir Karim, S.Ag, M.Si, Ph.D selaku penguji 2
7. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si sebagai pembimbing 1
8. Bapak Muh. Ridha, S.Hi, M.A. sebagai pembimbing 2
9. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Politik dan seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi ini.

10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik (ipo 7/8) dan seluruh teman-teman tanpa terkecuali yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman jurusan ilmu politik terkhusus kepada mereka yang sama-sama berjuang mulai ujian proposal, konprehensif, hingga menuju ujian hasil yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis agar segera sarjana.
12. Teman-teman KKN angkatan 56 Di Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombol Pao, Desa Tonasa.

Samata, 22 Maret 2018



Usman Ali

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Karya Terdahulu	9
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Teoritis	15
B. Kerangka Konseptual	25
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi penelitian	26
C. Jenis data	27
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Analisa Data	30
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Konsistensi pemerintah dalam implementasi kebijakan terhadap ruang terbuka hijau di kota Makassar (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau).....	56

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	88
B. IMPLIKASI.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar.....	40
Table 1.2 Jenis, Fungsi dan Tujuan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	55
Table 1.3 Hasil Identifikasi Ruang Terbuka Hijau kota Makassar tahun 2016	74
Table 1.4 rangkuman hasil identifikasi ruang terbuka hijau kota Makassar tahun 2016	77



ABSTRAK**Nama : Usman Ali****NIM : 30600113116****Judul : POLITIK LINGKUNGAN (Studi terhadap Kebijakan****Pemerintah Kota Makassar terhadap Ruang Terbuka Hijau)**

Penelitian ini mengkaji tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar terkait konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tingkatan Administratif Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah direspon oleh pemerintah kota Makassar dengan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar diatur dalam Peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta Peraturan Walikota Makassar No. 69 tahun 2016 tentang izin pemanfaatan penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar, namun dalam tingkatan implementasi ketersediaan Ruang terbuka hijau di kota Makassar masih sangat minim. Hal ini, dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan angka 7,584% dari 30% yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini membutuhkan perhatian baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola maupun mengembangkan RTH.

Implikasi dari penelitian ini adalah dalam mewujudkan jumlah ketersediaan RTH Sebagaimana yang diatur Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seharusnya pemerintah kota Makassar menjadikan Peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta Peraturan walikota Makassar No. 69 tahun 2016 tentang izin pemanfaatan penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar dalam mengelola RTH.

ABSTRAK

Nama : Usman Ali

NIM : 30600113116

Judul : POLITIK LINGKUNGAN (Studi terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Makassar terhadap Ruang Terbuka Hijau)

Penelitian ini mengkaji tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar terkait konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tingkatan Administratif Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah direspon oleh pemerintah kota Makassar dengan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar diatur dalam Peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta Peraturan walikota Makassar No. 69 tahun 2016 tentang izin pemanfaatan penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar, namun dalam tingkatan implementasi ketersediaan Ruang terbuka hijau di kota Makassar masih sangat minim. Hal ini, dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan angka 7,584% dari 30% yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Implikasi dari penelitian ini adalah dalam mewujudkan jumlah ketersediaan RTH Sebagaimana yang diatur Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seharusnya pemerintah kota Makassar menjadikan Peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta Peraturan walikota Makassar No. 69 tahun 2016 tentang izin pemanfaatan penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar dalam mengelola RTH.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bidang yang semakin menarik perhatian sekarang adalah persoalan Lingkungan. Isu permasalahan lingkungan yang muncul belakangan ini adalah kelangkaan sumber daya, hujan asam, pelapisan ozon dan pemanasan global.

Bagi Indonesia, permasalahan lingkungan hidup sebenarnya bukan hal baru. Karena sejak lingkungan hidup menjadi hal yang menarik duni ini ditandai dengan penyelenggaraan konferensi lingkungan hidup sedunia tahun 1972, Indonesia telah meresponnya antara lain dengan pencantunan soal lingkungan hidup dalam GBHN 1973-1978, dan juga dalam naskah Repelita II tahun 1974-1979.

Akan tetapi, dalam rangka waktu yang relatif cukup panjang dalam soal pengelolaan lingkungan indonesia belum juga Nampak kemajuan yang berarti, bahkan sebaliknya, akibat pemanfaatan yang semena-mena untuk kepentingan jangka pendek.¹

Perkembangan penduduk merupakan salasatu persoalan lingkungan di Indonesia khususnya di Kota Makassar, hal ini juga dikemukakan oleh Homer-Dixon dan kawan-kawan bahwa kegiatan manusia dapat menyebabkan kerusakan atau kelangkaan sumberdaya dalam tiga jalan diantaranya ialah pertumbuhan penduduk, dengan bertambahnya penduduk, tanah dan air yang

¹Lukman f. Mokoginta. *Bumi Bukan Milik Kapitalis* (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2009), h. 15.

jumlahnya tetap sama sudah barang tentu dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. hal ini berarti jumlah pemakai tanah dan air perorang semakin berkurang.²

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mempengaruhi tingkat pembangunan seperti yang terjadi di Kota Makassar. Kota merupakan aktivitas manusia yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan pendidikan, serta penyediaan fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Dalam perjalanannya, kota mengalami perkembangan sangat pesat akibat adanya dinamika penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan terjadinya interaksi dengan wilayah dengan yang lainnya.

Jumlah penduduk yang terus meningkat di Kota Makassar mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasikan kepentingannya. Semakin meningkatnya permintaan ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan.

Selain jumlah penduduk yang terus meningkat besarnya ambisi serta tingginya gairah mengejar pertumbuhan ekonomi yang dalam implementasinya, antara lain diberinya kesempatan seluas-luasnya bagi penanaman modal asing (sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1967 tentang penanaman modal asing) disertai pemberangusan hak-hak politik rakyat oleh pemerintah yang korup, disadari atau tidak telah

²Bruce Mitchell, B. setiawan, dwi Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*,(Yogyakarta: Gadj Mada University Press), h. 10.

memberikan kontribusi besar bagi kerusakan lingkungan.³ Keterbatasan lahan karena kebutuhan penduduk dan kegagalan pasar dalam mengatasi dampak pembangunan maupun industrialisasi berdampak terhadap jumlah RTH yang ada.

RTH yang diharapkan jadi solusi dari kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan lingkungan tidak mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal karena jumlahnya yang sedikit. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat tidak mampu mencegah alih fungsi lahan diperkotaan sehingga keberadaan Ruang terbuka hijau semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas.

Berkurangnya jumlah ruang terbuka hijau seperti yang dikatakann James Siahan bahwa kecendrungan terjadinya penurunan kuantitas ruang publik, terutama Ruang terbuka hijau 30 tahun terakhir sangat signifikan. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar, luas ruang terbuka hijau telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970-an menjadi 10% pada saat ini. Ruang terbuka hijau yang ada sebagian besar telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan dan kawasan pemukiman baru.⁴

Dalam Al-quran dijelaskan bahwa kerusakan di alam akibat ulah kejahatan manusia. Sehingga berbagai akibat dari perusakan itu ditanggung oleh manusia juga. Hal ini tampak jelas dalam QS. Arrum/30: 41

³Lukman f. Mokoginta. *Bumi Bukan Milik Kapitalis*. h. 16.

⁴Jamalianuri, *Dinamika politik tata ruang perkotaan di Jakarta*, Skripsi, Universitas Indonesia, h. 2.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*⁵.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kerusakan yang kita rasakan saat ini baik di darat maupun di laut merupakan akibat dari kegiatan, aktivitas atau kebijakan manusia yang tidak mengindahkan pada keberlangsungan kehidupan.

Dalam al-quran dijelaskan bagaimana ancaman allah terhadap manusia yang senantiasa merusak alam. QS.Shod/38 : 27 , juga dijelaskan :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

مِنَ النَّارِ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

*Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka*⁶.

Sekali saja manusia mengabaikan hak alam atau diperlakukan secara zalim oleh manusia dengan cara menciptakan kerusakan, maka alam pun akan melakukan perlawanan kepada manusia. Perlawanannya bisa berupa banjir, longsor, badai, atau krisis ekologi yang berdampak sangat mengerikan bagi

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV. Penerbit J-Art, 2004), h. 408.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 455.

umat manusia. Bukan hanya sekarang dampak yang dirasakan, tapi bisa menimpa anak cucu kita, generasi mendatang yang tidak berdosa.

Hanya manusia arif saja yang mampu menangkap keinginan alam yang juga berharap untuk diperlakukan dengan baik. Karena perusakan lingkungan termasuk tindakan kufur nikmat, maka tidak ada alasan bagi umat manusia arif untuk melakukan pembangkangan kepada Tuhan dengan cara merusak alam yang sebenarnya menjadi sumber rahmat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَ سُْرِقَ مِنْهُ مَا صَدَقَةٌ وَ
مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ الطَّيْرُ فَ الطَّيْرُ لَهُ لَا يَزِرُهُ وَهُوَ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ صَدَقَةٌ لَهُ

Artinya:

Dari Jabir ra. Dia berkata, 'Berkata Rosulullah saw,' Tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman, melainkan hasil tanaman yang dimakan akan menjadi sedekah baginya, dan hasil tanaman yang dicuri akan menjadi sedekahnya pula.' (HR. Imam Muslim Hadits no.1552).⁷

Untuk itu mari kita barengi ilmu pengetahuan dengan agama, sebab ilmu tanpa agama akan buta, dan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lumpuh. Untaian hikmah ada yang mengatakan "*religious without belive is empty* " agama tanpa ilmu pengetahuan itu akan kosong. Hanya dengan menjalankan ajaran agama, kita akan mampu melestarikan lingkungan hidup, dan menatanya serapi mungkin. Pandanglah cakrawala yang luas Maha Agung ciptaan Allah, kita ciptakan keamanan, ketertiban dan keindahan di bumi yang tercinta ini dengan merealisasikan " kebersihan itu adalah sebagian dari iman " QS. Al-ahزاب/ 72

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Shahihul Bukhari*, jilid 3 (Darul Fikr: Bairut, Libanon: 1415 H), h. 999.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh⁸.

Allah melengkapi manusia dengan tabiat yang majemuk sehingga mampu membangun peradaban di atas bumi dan karena hal inilah Allah melebihi manusia dari semua makhluk ciptaan Allah lainnya termasuk melebihi malaikat terutama karena manusia memiliki kemampuan berpikir dalam bidang ilmu pengetahuan sehingga manusialah yang berhak menjadi khalifah di bumi ini. Karena itulah manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pemeliharaan lingkungan. Beberapa kasus tadi, tentu dapat menjelaskan bahwa ancaman terhadap lingkungan hidup di Indonesia perlu perhatian serius. Penyebabnya, “perusakan lingkungan” dan “pencemaran lingkungan” baik terjadi dengan sengaja maupun tak sengaja dari tahun ketahun semakin meningkat.⁹

Perkembangan kawasan perkotaan yang sedemikian cepat harus dibarengi oleh peningkatan kapasitas pemangku kepentingan untuk mempertahankan kualitas lingkungan kehidupan perkotaan. Kondisi pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang semakin tinggi dan perkembangan pembangunan fisik kota yang sangat pesat menyebabkan

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 427.

⁹ Lukman f. Mokoginta. *Bumi Bukan Milik Kapitalis*. h. 17.

perencanaan ruang terbuka hijau untuk masa yang akan datang baik dari segi kualitas maupun kuantitas menjadi sebuah hal yang sangat penting sehingga keselarasan lingkungan alam dan lingkungan binaan dapat terwujud.

Untuk mewujudkan keseimbangan itu dibutuhkan peran pemerintah yang selama ini masih kurang mengapresiasi akan pentingnya ruang terbuka hijau sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, standar luas ideal ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yaitu minimal 30% dari luas kawasan perkotaan, inkonsistensi kebijakan dan strategi Tata Ruang Kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Induk Kota, serta lemahnya fungsi pengawasan (kontrol) dalam pelaksanaan pembangunan kota menyebabkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau semakin berkurang. Hal ini terlihat dalam hasil penelitian sebelumnya, dimana Luas lahan hutan kota di Kota Makassar adalah seluas 125,64 Ha, pemakaman seluas 100,02 Ha, Bakau seluas 558,93 Ha, Sempadan seluas 274,07 Ha, Jalur hijau seluas 71,21Ha, lapangan seluas 197,61 Ha dan pertamanan seluas 132,90. Dari total luas keseluruhan komponen penyusun ruang terbuka hijau adalah seluas 1.264,58 Ha, jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Makassar yaitu 17.577 Ha, maka proporsi ruang terbuka hijau yang tersedia di Kota Makassar adalah 8,31% dari luas Kota Makassar.¹⁰ Berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan mengenai luas ideal dari ruang terbuka hijau dalam kota yaitu minimal 30% dari luas wilayah kota, ruang terbuka hijau Kota Makassar belum memenuhi persyaratan bagi tersedianya ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

¹⁰Usman Afdhaliyah K., "Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perumahan Padat Penduduk di Kota Makassar", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, h. 7.

Ketersedian RTH di Kota Makassar terus mengalami penurunan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas, ini terbukti dimana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2013 menunjukkan jumlah RTH di Kota Makassar sebanyak 8,31% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu 7,58%.¹¹

keterbatasan luas lahan akibat kebutuhan dengan jumlah yang besar dan benturan kepentingan dalam fenomena pembangunan perkotaan, lebih ditekankan pada pentingnya pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan yang dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja yang hanya untuk kepentingan ekonomi jangka pendek.

Bentuk kelembagaan yang sesuai dan efektif untuk pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan (dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian) ruang terbuka hijau masih sangat kurang dan ketidakjelasan penanggung jawab antar institusi terkait lingkungan. Mungkin tetap perlu dikaji ulang. Perlu ada semacam Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan paradigma tata pemerintahan yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan masalah, yaitu: Bagaimana konsistensi pemerintah dalam implementasi kebijakan terhadap ruang terbuka hijau di kota Makassar (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau)?

¹¹ Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 111.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terhadap ruang terbuka hijau di kota Makassar.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan pemahaman teoritis baik bagi penulis sendiri maupun pembaca selain itu, juga diharapkan agar bisa menjadi acuan untuk penelitian yang berbasis lingkungan selanjutnya.
2. Manfaat praktis: memahami bagaimana keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 ruang terbuka hijau dan langkah yang diambil untuk kelanjutan ruang terbuka hijau.

E. Tinjauan Karya Terdahulu

Setelah menelusuri beberapa penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis menyebutkan beberapa diantara yang serupa dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian oleh Randi Ruslan yang berjudul Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene penelitian ini membahas proses pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau terhadap pembangunan kota di Kabupaten Majene, peran pemerintah terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, mulai dari pola dasar pembangunan kota, analisis pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan tata kelola ruang

terbuka hijau dalam pembangunan kota di Kabupaten Majene, mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Majene, memberikan pemahaman bahwa ruang terbuka hijau penting untuk kawasan perkotaan terkait pemenuhan 30 % ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, menghasilkan rancangan pengembangan kawasan ruang terbuka hijau di kabupaten Majene serta menghasilkan regulasi yang lebih khusus di daerah atau wilayah yang diteliti mengenai ruang terbuka hijau. Metode penelitian digunakan adalah penelitian analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang Ruang Terbuka Hijau yang difokuskan pada pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Majene.¹² Pembangunan Sebagai manifestasi dari fungsi dan manfaat RTH di perkotaan, maka rencana penyediaan RTH diharapkan mampu memulihkan ekosistem di perkotaan yang telah rusak. Dengan melihat perkembangan Kota Majene, maka jenis RTH yang dapat direncanakan adalah; RTH pekarangan, RTH Taman dan Hutan Kota serta RTH Jalur Hijau jalan. Dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau disesuaikan dengan konsep rencana pengembangan. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan terletak dari lokasi dan lebih berfokus pada pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau.

2. Penelitian oleh Achmad Mukafi yang berjudul Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus penelitian ini membahas luasan ruang

¹²Randi Ruslan, "Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, h. xvii.

terbuka hijau publik dan Potensi ruang terbuka hijau publik yang berada di Kota Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa luasan ruang terbuka hijau publik di Kota Kudus sesuai dengan tuntutan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 dan mengetahui apa saja potensi ruang terbuka hijau publik yang tersedia di Kota Kudus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.¹³ Keberadaan RTH di Kota Kudus terdesak oleh semakin berkembangnya alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun, terlebih alih fungsi sebagai pembangunan non hijau. Padahal sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 tahun 2008 mensyaratkan bahwa ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan minimal harus terpenuhi sebesar 20% dari luas total wilayah kota. Selain itu disebutkan juga dalam UU No. 26 tahun 2007. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Kudus. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus pada potensi-potensi ruang terbuka hijau yang tersedia dan jumlah ruang terbuka hijau yang ada.

3. Penelitian oleh Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal dan Agus R. Soeriaatmadja yang berjudul Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung penelitian ini membahas identifikasi kebutuhan ruang terbuka hijau kota pada kawasan studi yang memiliki karakter sebagai kawasan terbangun padat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan pendekatan urban landscape ecology (ekologi lanskap urban). Faktor manusia dan alam

¹³Achmad Mukafi, "Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang 2013 h. viii.

dipertimbangkan secara seimbang dalam setiap tahap pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk sistem ruang terbuka hijau yang sesuai dengan kebutuhan kawasan serta dapat memberikan kontribusi terhadap sistem pada skala yang lebih besar.¹⁴

Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia pada wilayah perkotaan. Saat ini proporsinya semakin berkurang seiring peningkatan populasi dan kepadatan penduduk, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara kedua sistem tersebut. Untuk memperbaikinya serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara umum, ruang terbuka hijau kota perlu dikembalikan dalam bentuk sistem agar dapat berperan optimal. Pembentukan sistem ruang terbuka hijau merupakan respon terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau pada suatu wilayah perkotaan. Kebutuhan ini secara ideal harus mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi dari wilayah tersebut.

4. Penelitian oleh Arya Banga Marbun berjudul Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pendukung Sarana Olahraga Di Perkotaan penelitian ini membahas tentang ruang terbuka hijau, sarana olahraga dan perkotaan, dalam perkotaan ruang terbuka hijau semakin berkurang khususnya sarana olahraga umum. Penelitian ini bertujuan diantaranya agar kota metropolitan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dari segi olahraga, kota metropolitan juga sebaiknya dapat memaksimalkan lahan yang tersedia untuk kebutuhan

¹⁴Widyastri Atsary Rahmy dkk, "Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung", *Jurnal ruang terbuka hijau*, Vol.1 No.1 (Juli 2012), h. 27. <http://related:jlbi.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2012/07/V1N1-p027-p038-Kebutuhan-Ruang-Terbuka-Hijau-Kota-Pada-Kawasan-Padat.pdf> (Diakses 24 Maret 2018).

masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan survey dan studi kasus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁵ Kota Jakarta yang penduduknya semakin banyak membuat lahan di kota Jakarta semakin banyak di gunakan sebagai daerah pemukiman. Walaupun lahan-lahan di Jakarta sudah semakin banyak yang di pergunakan sebagai tempat pemukiman namun masih saja dianggap kurang. Kota Jakarta yang ramai akan penduduknya yang juga sibuk dengan kegiatan masing-masing membuat orang-orang di kota besar semakin malas untuk berolahraga, ini diakibatkan oleh kesibukan dan kurangnya lahan untuk berolahraga. Walaupun terdapat tempat-tempat untuk berolahraga yang disediakan oleh pemerintah namun banyak sekali yang masih dipungut biaya. Ada juga lahan yang dapat di pergunakan oleh masyarakat untuk melepas hobi mereka berolah raga dengan menggunakan lahan yang tidak terpakai, namun pada saat sipemilik lahan ingin menggunakan lahannya untuk hal lain (bukan olahraga) masyarakat harus pergi. Perbedaan dari penelitaian yang akan dilakukan berfokus pada ruang-ruang terbuka hijau untuk sarana olahraga dan perlunya penyediaan lahan olah raga di perkotaan.

5. Penelitian oleh Kiki Hidayat yang berjudul Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 penelitian ini membahas ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu tahun 2014. Dengan titik kajian luas wilayah, luas ruang terbuka hijau publik dan

¹⁵Arya Banga Marbun,"Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pendukung Sarana Olahraga di Perkotaan",*Skripsi*, Universitas Indonesi 2007 h.7.

persebaran ruang terbuka hijau publik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui standar penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas wilayah di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2014.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan objek penelitian berupa ruang terbuka hijau publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu sudah mencukupi standar kebutuhan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti ketersediaan ruang terbuka hijau publik di kota kudas.



¹⁶Kiki Hidayat, "Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014", *Skripsi*, Universitas Lampung Bandar Lampung 2014, h. 55.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Teori Produksi Ruang

Karya terobosan dalam teori ruang neo-Marxian adalah *The Production of space* karya Henry Lefebvre. Lefebvre mengatakan bahwa teori Marxian perlu menggeser fokusnya dari cara-cara produksi ke produksi ruang atau dengan kata lain, dia ingin melihat pergeseran fokus dari hal-hal dalam ruang (misalnya, cara-cara produksi seperti pabrik) ke produksi ruang aktual itu sendiri.¹⁷

Aspek utama dari argumen Lefebvre yang kompleks itu terletak dalam tiga perbedaan berikut ini. Dia mulai dengan praktik spasial (*spatial practice*), yang menurutnya melibatkan produksi dan reproduksi ruang, yang melapisi dan akhirnya mendominasi praktik spasial adalah apa yang dinamakan Lefebvre sebagai representasi ruang (*representation of space*). Ini adalah ruang yang dibayangkan oleh sebagian elite masyarakat seperti perencana tata kota dan arsitek. Mereka menganggapnya sebagai “ruang sesungguhnya”, dan dipakai oleh mereka dan oleh yang lainnya untuk mencapai dan mempertahankan dominasi. Jadi, misalnya, perencana tata kota mendesain, secara teoritis, untuk menggusur rumahrumah kaum miskin yang kumuh dan menggantikannya dengan perumahan yang jauh lebih baik dan modern. Akan tetapi pembaruan kota itu kemudian disebut

¹⁷ George ritzer dan Douglas J Goodman, Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian, (Yogyakarta: kreasi wacana, 2004), h. 165.

“pembongkaran urban”. Kelompok miskin digusur untuk membuka perumahan baru, tetapi ketika perumahan baru keluarga kelas menengah atas perkotaan, sering kali kelompok miskin ini harus pindah ke daerah baru, dan sering kali mendapatkan rumah yang tidak lebih baik dibanding yang mereka tinggalkan. Mereka juga terpaksa beradaptasi dengan daerah baru dan komunitas, dan tetangga baru. Jadi, “praktik spasial” terhadap kaum miskin dan radikal diubah oleh “representasi ruang” dari mereka yang mendukung, menciptakan, dan mengimplementasikan pembaruan urban.

Representasi ruang mendominasi tidak hanya atas praktik spasial, tetapi juga atas ruang-ruang representasional (representational spaces). Sementara representasi ruang adalah ciptaan dari kelompok dominan, ruang representasional berasal dari pengalaman hidup orang khususnya dari kalangan bawah atau klendestin. Seperti yang telah kita lihat, sementara representasi ruang dianggap sebagai “ruang sesungguhnya” oleh pemegang kekuasaan, representasi ruang itu lalu menghasilkan “kebenaran ruang”.¹⁸ Yakni, mereka mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam pengalaman hidup ketimbang sebuah kebenaran abstrak yang diciptakan oleh seseorang seperti perencana tata kota, untuk meraih dominasi. Akan tetapi dalam dunia kontemporer, representasi ruang dengan, sebagaimana praktik ruang, menderita karena hegemoni representasi ruang. Dalam kenyataannya, Lefebvre melanjutkan dengan mengatakan, “ruang representasional lenyap didalam representasi ruang”. Jadi, problem utama

¹⁸ George ritzer dan Douglas J Goodman, Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian, (Yogyakarta: kreasi wacana, 2004), h. 166.

menurut Lefebvre adalah pradominasi dari elite representasi ruang atas praktik spasial sehari-hari dan ruang-ruang representasional.

Kalau pemaparan di atas adalah cara membicarakan ruang dalam tataran ideal, Lefebvre menawarkan pembagian triparti kedua yang membicarakan ruang dalam ruang yang lebih material dan lebih optimis. Senada dengan Marx tentang manusia sebagai spasies, Lefebvre mengawalinya dengan apa yang disebutnya sebagai ruang-ruang absolut, atau ruang alamiah (misalnya, kawasan hijau) yang tidak dikolonialisasi, dipandang keutentik, atau dihantam oleh kekuatan ekonomi dan politik.¹⁹

Lefebvre pun tidak banya berbicara tentang ruang absolut. Kalau Marx lebih banyak mengkritik atas kapitalisme, maka Lefebvre lebih tertarik pada analisis kritis atas apa yang disebutnya dengan ruang abstrak adalah ruang menurut sudut pandang subjek abstrak seperti perencanaan kota atau arsitek.

Mirip dengan Lefebvre yang berkonsentrasi pada ruang, menurut Massey ruang sosial terbentuk secara rasional dari eksistensi bersama antara hubungan dan interaksi sosial. Messay mengusulkan lima argumen pokok mengenai ruang:²⁰

- a. Ruang adalah sebuah kontruksi sosial.
- b. Dunia sosial terkonstruksi secara spasial (berdasarkan ruang)

¹⁹ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*, (Yogyakarta: kreasi wacana, 2004), h. 167.

²⁰ Muhammad Ridha, *Sosiologo Waktu Senggang: Eksploitasi dan Komodifikasi Perempuan di Mal*, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), h. 39.

- c. Ruang sosial tidak statis tapi dinamis, terbentuk oleh ruang-ruang sosial yang terus berubah.
- d. Ruang terkait dengan persoalan kekuasaan dan simbolisme, yakni geometri kekuasaan ruang.
- e. Ruang sosial mengendalikan adanya sebuah kejamakan ruang yang simultan: saling-silang, tumpang tindih, saling berdampingan atau berada dalam hubungan paradox atau antagonis.

Produksi ruang menempati dua posisi dalam karya lifebvre. Pertama, seperti yang dibahas di bawah ini, ia menjadi fokus baru analisis dan kritik. Jadi, perhatian kita harus beralih dari saran produksi menjadi produksi ruang. Kedua, Lifebvre meletakkannya dalam konteks arah perubahan sosial yang dikehendaki. Jadi kita hidup di dunia yang ditandai oleh cara produksi yang berlangsung didalam ruang. Ini adalah dunia dominasi dimana control dijalankan oleh Negara, kapitalis dan borjuis. Dengan kata lain mereka memodifikasi ruang alamiah dengan untuk memenuhi kebutuhan kolektif mereka. Jadi, tujuan Lifebvre adalah “memproduksi ruang spesies manusia. Ruang planet luas sebagai landasan sosial bagi transformasi kehidupan sehari-hari.”²¹ Jadi, produksi ruang tidak sekedar fokus analitis lifebvre, namun juga merupakan tujuan politisnya sebagaimana halnya komunisme jadi tujuan politik Marx.

²¹ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*, (Yogyakarta: kreasi wacana, 2004), h. 170.

2. Teori implementasi kebijakan

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebiakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.²² Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi sedangkan implementasi adalah tindakan itervensi itu sendiri. Implementasi menurut teori Jones “*those activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan proses hingga memperlihatkan hasilnya)²³.

Implementasi merupakan proses perwujudan suatu perencanaan yang sudah disepekati sebelumnya, Van Meter dan Van Horn merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai:”tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan yang ditetapkan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Ada lima variable yang mempengaruhi kerja menurut

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 20

²³ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik, Berbasis Analisis Bukti, Untuk Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 45

Meter dan Horn yaitu: 1) standard an sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) karakteristik agen pelaksana, dan 5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²⁴

Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang strategis dan sangat menentukan dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijSakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.²⁵

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktifitas yang terlihat setelah pengarahan dikeluarkan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelolah imput untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi

²⁴Abdul Wahab Solihin, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implemntasi Kebijakasanaan Negara* (Cet II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 135.

²⁵Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik, Berbasis Analisis Bukti, Untuk Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta 2016) h. 57

masyarakat.²⁶ Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.²⁷

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik²⁸.

3. Teori Ruang Terbuka (*open space*)

Ruang terbuka mencakup pengertian ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang lainnya yang berupa kawasan tanpa bangunan diantara kawasan terbangun. Ruang terbuka menjadi penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Dari daerah terbangun dengan kegiatan industri akan menimbulkan emisi gas buang, dan konsentrasi manusia pada suatu tempat yang melampaui daya dukung lingkungan menimbulkan polusi udara yang berdampak buruk pada kehidupan manusia. Dampak tersebut antara

²⁶Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik, Berbasis Analisis Bukti, Untuk Pelayanan Publik*, h. 47

²⁷Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik, Berbasis Analisis Bukti, Untuk Pelayanan Publik*, h. 57

²⁸Riant Nugroho, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: PTElex Media Komputindo2003), h. 158.

lain gangguan pernapasan, pencetus kanker paru-paru, penurunan kecerdasan anak, dan penyakit jantung. Peranan ruang terbuka hijau menyediakan udara bebas untuk mengatasi dampak tersebut yang tidak hanya diperlukan di daerah perkotaan saja, tetap juga di pemukiman pedesaan yang padat.

Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.²⁹ Rustam Hakim meninjau ruang terbuka dari kegiatannya yang menurutnya dapat dibagi kedalam 1) ruang terbuka aktif yaitu ruang terbuka yang mengandung unsur-unsur kegiatan didalamnya seperti bermain, upacara, bersantai berjalan-jalan bersantai. Ruang ini berupa plaza, lapangan olahraga, area bermain, penghijauan di tepi sungai dll. 2) Ruang terbuka Pasif, yaitu ruang seperti lahan hijau yang digunakan sebagai jarak rel kereta api, jalur hijau pembatas bebas hambatan dll. Untuk itu secara umum, fungsi ruang terbuka itu sendiri dibagi menjadi empat macam, Fungsi ekologis (paru-paru kota, pengaturan iklim mikro, pengaturan dan

²⁹Budi Santos Dkk, "Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman", *Jurnal Wacana Ruang Terbuka Hijau, Land Use*, vol. VIII no.1. <http://journal.uny.ac.id/index.php/inersia/article/view/3694>. , (Mei 2012).

pengendali sistem air tanah), fungsi fisik (peneduh, penahan angin). Fungsi sosial budaya (tempat rekreasi dan, olahraga), fungsi estetika (memperindah lingkungan).³⁰

Ruang terbuka terdiri dari bentuk fisik dan nonfisik. bentuk fisik ditandai dengan dimensi fisik dan bentuk arsitektural sedangkan bentuk nonfisik merupakan gabungan dari proses historis dan politis.³¹ Ian C. Laurit menjelaskan ruang terbuka dalam lingkungan hidup (yaitu lingkungan alam dan manusia) dapat dikelompokkan menjadi: 1) Ruang terbuka sebagai produksi, yaitu ruang terbuka perhutanan, pertanian, produksi mineral, peternakan, perairan (*reservoir, energy*), perikanan dan lain-lain, 2) Ruang terbuka sebagai perlindungan kekayaan alam dan manusia, misalnya cagar alam hutan, kehidupan laut air daerah budaya dan bersejarah, 3) Ruang terbuka untuk kesehatan, kesejahteraan dan kenyamanan, diantaranya untuk melindungi kualitas air tanah, pengaturan, pembuangan air, sampah dan lain-lain, memperbaiki dan mempertahankan kualitas udara, rekreasi, taman lingkungan, taman kota dan seterusnya.

Ruang terbuka merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada suatu kawasan yang diperuntukkan agar masyarakat mampu menikmati ruang terbuka yang ada, Kevin Lych suatu ruang terbuka adalah suatu kawasan yang dapat dipergunakan sehari-hari maupun mingguan, dan harus dapat menanggung penggunaanya dalam beraktifitas serta terhubung secara langsung ataupun berinteraksi bersama dengan para pengguna lainnya.

³⁰Jahid Jamaluddin, *Ruang Public dan Resolusi Konflik*, h. 55.

³¹Jahid Jamaluddin, *Ruang Public dan Resolusi Konflik*, h. 02.

Suatu daerah terbuka harus diakses dengan mudah baik dengan menggunakan kendaraan maupun jalan kaki, namun keadaan tersebut harus dekat dan langsung kepada penggunaanya.³²

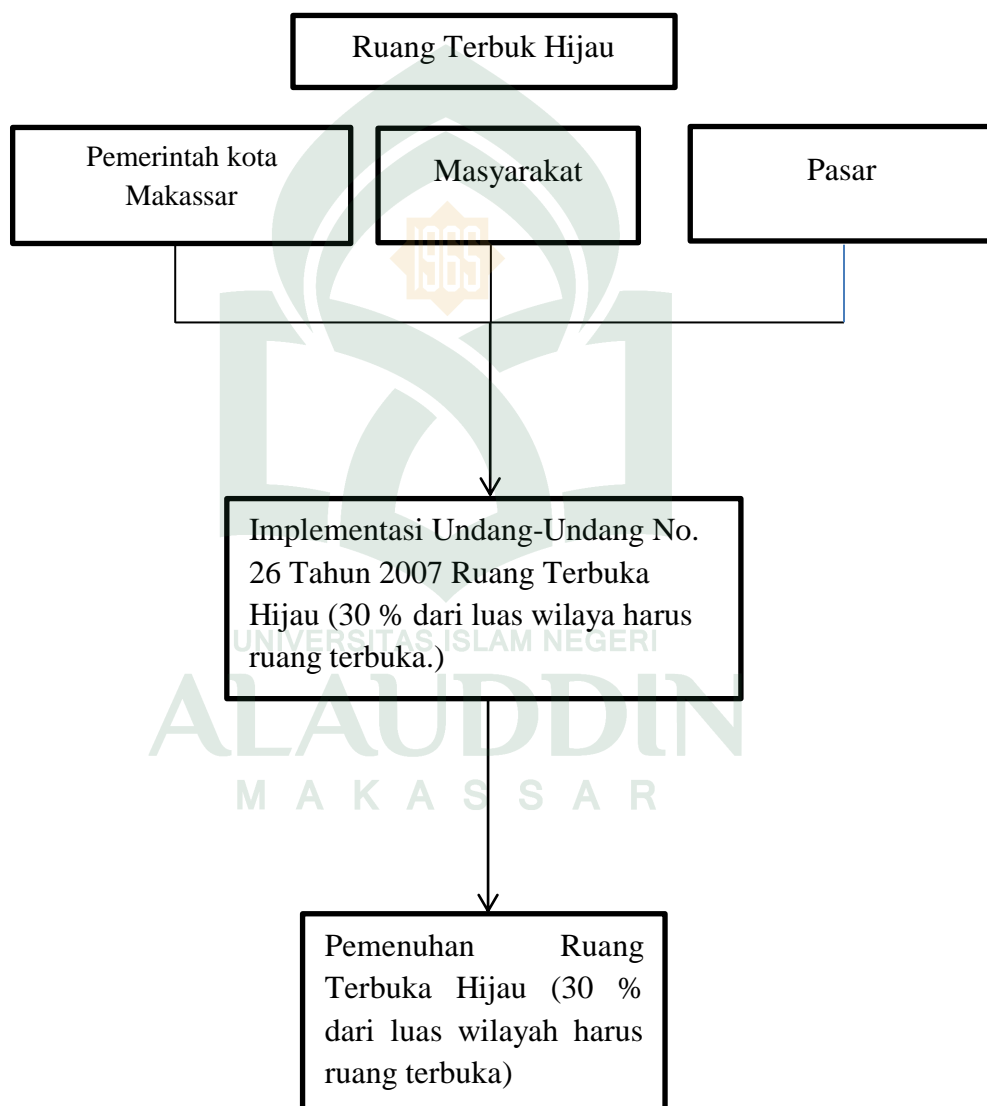
Permasalahan penataan ruang terbuka di daerah perkotaan dihadapkan pada terbatasnya ruang terbuka yang ada. Sementara itu, ruang terbuka yang ada terancam dengan penggunaan yang lain, misalnya dipasang papan reklame atau disalah gunakan oleh para pedagang atau pemukim liar. Sedangkan untuk menambah ruang terbuka, baik yang privat maupun yang publik dibatasi oleh efesiensi pemanfaatan ruang karena nilai tanah yang mahal. Di sini perlu ketegasan pemerintah daerah dengan menata ruang terbuka dengan pengaturan penyediaan dan perizinan penggunaan ruang terbuka. Pengaturan IMB misalnya, dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan penyediaan ruang terbuka pada ruang privat yang berdampak pada lingkungan. Sedangkan ruang terbuka publik harus diawasi penggunaannya agar tidak terganggu. Kelembagaan pengelola ruang terbuka perlu ditata baik dari tingkat pemerintah daerah (kota/kabupaten), terbuka terkait dengan kepentingan masyarakat luas maka pemerintah perlu melibatkan peran serta masyarakat.

Ruang terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang Terbuka Hijau, ruang publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud

³²Arya Banga Marbun,"Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pendukung Sarana Olahraga di Perkotaan",*Skripsi*, Universitas Indonesi 2007 h. 24.

dengan ruang terbuka adalah: ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan.³³

B. Kerangka Konseptual



³³Muliono sadyontomo, *Manajemen kota dan wilayah*, (Jakarta bumi aksara 2009) h. 152.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah tidak akan bisa lepas dari metode penelitian yang menjadi pedoman dalam proses pengambilan data di lapangan sampai pada proses analisis data. Pada bab ini akan diuraikan metode yang akan digunakan pada saat penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji.³⁴ Metode kualitatif yang menjadi pilihan peneliti dalam mengamati secara mendalam mengenai konsistensi pemerintah dalam tata kelola ruang terbuka hijau.

B. Lokasi penelitian

Penulis akan melakukan penelitian yang berlokasi di kota Makassar, tepatnya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar, Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, lembaga peduli lingkungan, dan beberapa anggota masyarakat untuk mendapatkan data-data atau informasi tambahan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

³⁴Lisa, Harrison. *Metodologi Penelitian Politik* (Jakarta: Kencana, 2009). h. 102.

C. Jenis Data

- a. Data primer yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penulis dan hasil observasi, data primer pada dasarnya memilih metode untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan, dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat mencari data sekunder ini melalui sumber data sekunder.³⁵

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Library research* yaitu cara pengumpulan data melalui buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun tanda bacanya.
 - b. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam bentuk ikhtisarnya.

³⁵Mudrarajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, h. 148.

2. *Field research* yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan.

Adapun beberapa metode pengumpulan data dilapangan diantaranya:

a. Obsevasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Jadi observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.³⁶ Pada tahap observasi peneliti akan melakukan pengamatan mengenai konsistensi pemerintah dalam tata kelola ruang terbuka hijau.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.³⁷

Secara garis besar ada tiga macam pedoman wawancara yaitu sebagai berikut :

1) Pedoman wawancara tidak terstruktur

³⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 106.

³⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, h. 108.

Pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden.

2) Pedoman wawancara terstruktur

Pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda (*check*) pada nomor yang sesuai.³⁸

3) Wawancara mendalam (*indept interview*)

Teknik pengolahan data yang pengumpulan datanya didasarkan pada percakapan secara intensif dengan satu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai mengenai apa yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah

³⁸Sofyan Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian* (Cet. III; Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 131

dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi adalah hasil rapat. Dalam proses dokumentasi peneliti akan merekam dan mencatat seluruh rangkaian penelitian untuk dijadikan sebagai arsip dalam mendukung validitas data yang didapatkan di lokasi penelitian.³⁹

E. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, setelah di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Maksud dari analisis data adalah untuk penyederhanaan ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasikan. Maksudnya analisis data disini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian. Analisis data dimulai sejak pengumpulan data dan dilakukan lebih intensif lagi setelah kembali dari lapangan. Seluruh data yang tersedia ditelaah dan direduksi sehingga terbentuk suatu informasi. Satuan informasi inilah yang ditafsirkan dan diolah dalam bentuk penelitian sampai pada tahap kesimpulan akhir.

³⁹Sofyan Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. h. 131

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis ini merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.⁴⁰

Adapun tiga komponen pokok dalam analisis data, yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan table bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, penyajian data

⁴⁰Sofyan Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. h. 131.

yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukakn untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.⁴¹

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/ kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitan erat dalam sebuah siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai hasil pemahaman dan pengertian peneliti.⁴²



⁴¹Sofyan Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. h. 215.

⁴²Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, h. 110.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan dikemukakan dalam bab ini terdiri dari sejarah, demografi wilayah, lingkungan fisik, dan batas-batas serta sector yang berhubungan dengan judul.

1. Gambaran Umum Kota Makassar

a. Sejarah Kota Makassar

Dalam profil Kota Makassar diktakan bahwa Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 175,79 km² dengan penduduk 1.112.688, sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.⁴³

Kota dan Bandar Makassar awalnya berada di muara Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah tersebut (abad XV). Mulanya Bandar Tallo berada dibawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Tetapi pada pertengahan abad XVI, Kerajaan Tallo dan

⁴³Profil Kabupaten / Kota Makassar.

Kerajaan Gowa bersatu dan melepaskan diri dari Kerajaan Siang, bahkan menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Kemudian pada abad XVI Kerajaan Gowa dan Tallo dipindahkan ke muara Sungai Jene'berang. Hal ini disebabkan terjadinya pendangkalan di hulu Sungai Tallo sebagai akibat dari tingginya kegiatan pertanian dari daerah tersebut. Di muara Sungai Jene'berang dilakukan pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertanahan Benteng Somba Opu, yang untuk selanjutnya seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti kota Makassar. Selain Benteng Somba Opu, pada masa pemerintahan Kerajaan Gowa XVI, didirikan pula Benteng Rotterdam yang berada di bagian utara.

Pada masa pemerintahan Kerajaan Gowa terjadi peningkatan aktifitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik. Hal ini merupakan masa dimana puncak kejayaan bagi Kerajaan Gowa. Namun selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya mengantarkan Kerajaan Gowa pada awal keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras yang dapat ditukar dengan rempah-rempah di Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan Saudagar Portugal maupun catatan-catatan Lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting Saudagar Melayu

dalam perdangangannya yang berdasarkan pertukaran surplus pertanian dengan barang-barang impor itu.

Menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil disekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris pula, maka Makassar meningkat produksi komoditi itu dengan berarti, bahkan, dalam menyerang kerajaan-kerajaan kecil lainnya, para ningrat Makassar bukan hanya menguasai kawasan pertanian lawan-lawannya itu, akan tetapi berusaha pula untuk membujuk dan memaksa para saudagar setempat agar berpindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di Bandar niaga baru itu.

Dalam kurun waktu hanya seadab, Makassar menjadi salah satu kota niaga tertemuka dunia yang di huni lebih 100.000 jiwa (dan dengan ini termasuk ke-20 kota terbesar dunia pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, kota terbesar musuh utamanya, baru mencapai sekitar 20.000 jiwa) yang bersifat kosmopolitan dan multikultural, serta menjadi salah satu kota terpenting di Asia 4 (empat) kota penting yaitu Ayyutia, Malacca, Batavia, dan Makassar). Perkembangan Bandar Makassar yang demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu.

Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian Timur dan Utara serta

mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Serta meningkatkan hubungan perdagangan dan diplomatic dengan kerajaan Otoman, Timur Tengah dan kerajaan-kerajaan islam lainnya di Indonesia Barat. Selanjutnya di abad ke-18, intensitas perdagangan yang terus meningkat. Bukan hanya rempah-rempah yang diperdagangkan tetapi juga hasil-hasil laut dan hutan.

Hal tersebut mendorong aktivitas kemaritiman masyarakat kota dan kawasan Makassar. Utamanya yang bermukim di sekitar kepulauan Spermonde, mereka mulai menspesialisasikan kegiatan sebagai pencari teripang yang merupakan komoditi utama yang dicari oleh saudagar yang berasal dari Cina. Bahkan di pertengahan abad ke-18, para nelayan/pelaut Sulawesi secara rutin berlayar hingga pantai utara Australia, dimana mereka tiga sampai empat bulan lamanya membuka puluhan lokasi pengolahan teripang.

Sampai sekarang, hasil laut masih merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk pulau-pulau dalam wilayah Kota Makassar. Abad ke-19 Makassar dijuluki sebagai “kota kecil terindah diseluruh Hindia-Belanda” (Joseph Conrad, seorang penulis Inggris-Polandia terkenal) dan menjadi salah satu ‘port of call’ utama baik para pelaut-pedangang Eropa, India, dan Arab dalam pemburuan hasil-hasil hutan yang amat laku di pasaran dunia maupun di perahu – perahu pribumi yang beroperasi di antara jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Pada abad ke-20, Makassar menjadi pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Tiga setengah dasawarsa Neerlandica, kedamaian di bawah pemerintahan kolonial itu adalah masa tanpa perang paling lama yang pernah di alami Sulawesi Selatan dan sebagai akibatnya, ekonomi berkembang dengan pesat. Penduduk Makassar dalam kurun waktu itu meningkat sebanyak tiga kali lipat, dan wilayah kota di perluas semua penjuru. Dideklarasikan sebagai Kota Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar kedua di luar Jawa yang membanggakan dirinya dengan Sembilan perwakilan asing, sederetan panjang toko di tengah kota yang menjual barabg-barabg mutakhir dari seluruh dunia an kehidupan sosial-budaya yang dinamis dan kosmopolitan. Kini Kota Makassar terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sbagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan aduentertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut, maupun udara.⁴⁴

b. Demografi Wilayah

1. Letak Geografis

Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi

Selatan secara geografis memiliki posisi strategis karena berada

⁴⁴Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, (Makassar: CV. Transmawan Lestari, 2016), h. 40.

pada persimpangan jalur lintas, baik dari arah utara ke selatan maupun dari arah barat ke timur. Dengan posisi ini Kota Makassar berpotensi besar menjadi Ruang Utama Indonesia Timur. Kota Makassar berada dalam titik koordinat $119^{\circ} 18' 30,18''$ sampai dengan $119^{\circ} 32' 31,03''$ BT dan $5^{\circ} 14' 6,49''$ LS serta terletak di pantai Barat Pulau Sulawesi.⁴⁵

2. Batas dan Luas Wilayah

Orientasi Wilayah Secara geografis Kota Metropolitan Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat $119^{\circ} 18' 27,97''$ - $119^{\circ} 32' 31,03''$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 00' 30,18''$ - $5^{\circ} 14' 6,49''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 175.77 km² dengan batas-batas berikut :

- a. Batas Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- b. Batas Selatan : Kabupaten Gowa
- c. Batas Timur : Kabupaten Maros
- d. Batas Barat : Selat Makassar

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT. Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang

⁴⁵Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 41.

bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.⁴⁶

Di bagian utara terdiri dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri dari Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terdiri dari Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Di bagian barat terdiri dari kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Wilayah Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Diantara kecamatan-kecamatan tersebut, terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang berbatasan dengan pantai yakni Kecamatan Mariso, Tamalanrea, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya.

Wilayah daratan terluas adalah Kecamatan Biringkanaya (48,22 km²) sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Mariso (1,82 km²). Sebagai kota yang berperan dalam roda perekonomian khususnya di kawasan timur Indonesia, Kota Makassar menjadi salah satu tujuan migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke kota guna mencari penghidupan yang layak (lapangan kerja). Hal ini tentu saja mempengaruhi jumlah penduduk dan perencanaan pembangunan di kota ini.

⁴⁶Profil Kabupaten / Kota Makassar.

3. Kependudukan

Kota Makassar merupakan salah satu kota di wilayah Sulawesi Selatan yang terus berusaha meningkatkan sumber daya manusianya. Dengan sumber daya manusia yang handal, tangguh, dan siap pakai diharapkan dapat member sumbangsih penting terhadap sukses tidaknya penyelegaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar⁴⁷

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Mariso	* 29,856	* 29,436	* 59,292
Mamajang	* 29,884	* 31,123	* 61,007
Tamalate	* 96,516	* 97,977	* 194,493
Rappocini	* 79,660	* 84,903	* 164,563
Makassar	* 42,048	* 42,710	* 84,758
Ujung Pandang	* 13,453	* 15,044	* 28,497
Wajo	* 15,164	* 15,769	* 30,933
Bontoala	* 27,579	* 28,957	* 56,536
Ujung Tanah	* 24,794	* 24,429	* 49,223
Tallo	* 69,739	* 69,428	* 139,167
Panakkukang	* 73,114	* 74,669	* 147,783
Manggala	* 69,541	* 69,118	* 138,659
Biringkanaya	* 100,978	* 101,542	* 202,520
Tamalanrea	* 54,988	* 57,182	* 112,170
Makassar	* 727,314	* 742,287	* 1,469,601

⁴⁷Sumber: BPS Kota Makassar

c. Lingkungan Fisik

1. Keadaan Iklim

Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang hingga tropis. Suhu udara rata-rata Kota Makassar dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 24,5°C sampai 28,9°C dengan intensitas curah hujan yang bervariasi. Intensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan November hingga februari. Tinggi intensitas curah hujan menyebabkan timbulnya genangan air di sejumlah wilayah kota ini. Selain itu, Kurangnya daerah resapan dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik memicu timbulnya bencana banjir.

2. Topografi

Berdasarkan topografinya, Kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tanah relatif datar, bergelombang, berbukit dan berada pada ketinggian 0-25 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, menunjukkan bahwa kemiringan 0-2%=85%; 2-3%=1%0; 3-15%=5%. Hal ini memungkinkan Kota Makassar berpotensi pada pengembangan pemukiman, perdagangan, jasa, industri, rekreasi, pelabuhan laut, dan fasilitas penunjang lainnya.⁴⁸

⁴⁸Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 47.

3. Geologi dan Struktur Batuan

Wilayah Kota Makassar terbagi dalam berbagai morfologi bentuk lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk lahan yang terdapat di Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua yaitu satuan morfologi daratan alluvial pantai dan satuan morfologi perbukitan bergelombang

Kedua satuan morfologi diatas dikontrol oleh batuan, struktur, dan formasi geologi yang ada di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Secara geologis Kota Makassar terbentuk dari batuan hasil letusan gunung api, dan endapan dari angkutan sedimen Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo. Sedangkan struktur batuan yang terdapat di kota ini dapat dilihat dari batuan hasil letusan gunung api dan endapan aluvial pantai dan sungai. Struktur batuan ini penyebarannya dapat dilihat sampai ke wilayah Bulurokeng, Daya, dan Biringkanaya. Selain itu, terdapat juga tiga jenis batuan lainnya seperti breksi dan konglomerat yang merupakan batuan berkomponen kasar dari jenis batuan beku, andesit, basaltik, batu apung.⁴⁹

4. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Makassar dipengaruhi oleh 2 (dua) sungai besar yang bermuara di pantai sebelah barat kota Sungai Jene'berang yang bermuara di sebelah selatan dan Sungai Tallo yang

⁴⁹Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 48.

bermuara di sebelah utara. Sungai jene'berang misalnya, mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara di bagian Selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m³/detik), sedangkan Sungai Tallo dan Pampang yang bermuara di bagian Utara Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m³/detik di musim kemarau. Selain itu, di pengaruhi juga oleh sistem hidrologi saluran perkotaan, yakni kanal-kanal yang hulunya didalam kota dan bermuara di laut.⁵⁰

5. Ekosistem

Keanekaragaman hayati yang ada di Kota Makassar berpengaruh terhadap dinamika perubahan bentang alam khususnya garis pantai di kota ini. Keanekaragaman hayati ini terdiri atas ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut. Ekosistem-ekosistem tersebar hingga ke 11 (sebelas) pulau dengan gusung-gusung yang ada di kota ini. Berikut gambaran kondisi keanekaragaman hayati yang ada di kota Makassar.⁵¹

a. Ekosistem mangrove

Kota Makassar memiliki garis pantai kurang lebih sepanjang 35 km, dengan tambahan pembangunan *Centerpoint Of Indonesia* (COI) sepanjang sekitar 5 km hingga total panjang garis pantai Makassar kini adalah sekitar 40 km. Dengan panjang

⁵⁰Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 49.

⁵¹Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 50.

garis pantai tersebut, vegetasi mangrove hanya di jumpai di daerah-daerah tertentu yang termasuk ke dalam empat wilayah kecamatan pesisir (Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate).

Kondisi ekosistem mangrove di kecamatan-kecamatan telah mengalami degradasi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar telah dikoversi menjadi tambak, pemukiman, dan kegiatan industri. Pada umumnya tambak tersebut saat ini digunakan untuk pemeliharaan ikan bandeng dan minim sekali untuk pemeliharaan udang. Pantai Kecamatan Biringkanaya dengan wilayah administrasi kelurahan pantai yaitu kelurahan Untia yang merupakan muara sistem Sungai Mandai.

Pada lokasi ini vegetasi mangrove dijumpai pada hampir di seluruh garis pantai dan bagian muara sungai dengan ketebalan berkisar antara 5-50 m. jenis mangrove yang dijumpai adalah *Avicennia Alba* dan *Rhizophora Mucronata* sebagai jenis yang dominan, sedangkan jenis lain yang dijumpai adalah *Rhizophora Apiculata* dan *Sonneratia Alba*. Pantai yang tidak bervegetasi mangrove adalah bagian disekitar kampung nelayan. Mangrove di daerah ini dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat disekitarnya. Pemanfaatan langsung diantaranya adalah untuk kayu bakar, penunjang bangunan, penunjang perikanan pantai, seperti: kepiting, habitat benih udang, dan ikan.

Pemanfaatan tidak langsung adalah sebagai pelindung pantai dan atau pematang tambak.⁵²

Pantai Kecamatan Tamalanrea sebagian besar bukan merupakan muara sistem sungai (Kelurahan Bira dan Parang Loe), kecuali di selatan Kelurahan Parang Loe yang berbatasan langsung dengan Sungai Tallo. Pada lokasi ini, vegetasi mangrove dijumpai pada sebagian garis pantai dan bagian muara Sungai Tallo dengan ketebalan berkisar antara 2-50 m. jenis mangrove yang dijumpai adalah *Rhizophora Mucronata* dan *Avicennia Alba* sebagai jenis yang dominan, sedangkan jenis lain yang dijumpai adalah *Rhizophora Apiculata* dan *Sonneratia Alba*. Pantai yang tidak bervegetasi mangrove adalah sebagian di Kelurahan Bira (Lantebung), serta sebagian tertentu Pantai Kelurahan Parang Loe karena dikoversi menjadi tambak, pemukiman dan industri.

Pantai Kecamatan Tallo merupakan bagian muara sistem Sungai Tallo dengan wilayah administari desa/kelurahan adalah Kelurahan Tallo, Kaluku dan Buloa. Vegetasi mangrove dijumpai hanya sebagian kecil di Tanjung Kelurahan Tallo dengan luasan kurang dari 0,1 ha. sehingga dapat dikatakan sebagai lahan mangrove yang minim. Jenis mangrove di daerah ini adalah *Avicennia alba*. Mangrove di daerah ini dimanfaatkan secara tidak

⁵²Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 50.

langsung oleh masyarakat disekitarnya, yaitu untuk pelindung pantai dan/atau pematang tambak.⁵³

Pantai Kecamatan Tamalate merupakan bagian muara sistem Sungai Jene'berang dengan wilayah administrasi kelurahan adalah kelurahan Maccini Sombala, Tanjung Merdeka, dan Barombong. Pada lokasi ini hampir keseluruhan pantai mempunyai tipe pantai berpasir dan vegetasi mangrove dapat dijumpai hanya di Kelurahan Maccini Sombala pada jarak sekitar 30 m di bagian belakang garis pantai. Mangrove di lokasi ini luasnya sekitar 1 (satu) hektar, karena sebagian besar arealnya di koversi menjadi tambak. Jenis mangrove yang dapat dijumpai adalah *Avicennia Alba* sebagai jenis yang dominan, sedangkan jenis lainnya adalah *Sonneratia Alba*. Mangrove di daerah ini dimanfaatkan secara tidak langsung oleh masyarakat sekitarnya, yaitu untuk pelindung pantai dan/atau pematang tambak.

d. Ekosistem Terumbu Karang

Secara umum tipe terumbu karang yang ada di perairan Kota Makassar adalah tringing reefs dengan persentase penutupan karang hanya berkisar antara 0-65%. Mulai dari kategori rusak berat hingga kategori sehat. Kategori sehat terdapat di pulau

⁵³Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 52.

Samalona (persentase karang hidup 65%) dan di pulau Kodingareng Lompo (persentase karang hidup 56%).⁵⁴

e. Ekosistem Padang Lamun dan Rumput Laut

Terdapat jenis-jenis lamun seperti *H. Uninervis*, *T. Hemprichii*, *E. Acoroides*, *S. Isoetifolium*, *C. Serrulata*, *H. Decipiens*, *H. Minor*, dan *H. Ovalis* di Pulau Barrang Lompo. Persentase penutupan rumput laut berkisar antara 1-80%. Persentase penutupan terbesar ditemukan di Pulau Kayangan. Sedangkan persentase penutupan lamun berkisar antara 3-85%.

Persentase penutupan yang lebih dari 50% ditemukan di Pulau lumu-lumu (70%), Pulau Bone Tambu (75%), Pulau Barrang Lompo (85%), Pulau Kadingareng Lompo (80%), dan Pulau Kadingareng Keke(60%). Sampai saat ini belum ada kriteria atau klasifikasi yang dapat menentukan tingkat kerusakan ekosistem berdasarkan persentase penutupan rumput laut dan lamun.⁵⁵

1. Kelautan

a. Pasang Surut

Pasang surut yang terjadi di perairan Pantai Makassar merupakan bagian dari pasang surut di Selat Makassar. Gelombang pasang surut di pereiran pantai

⁵⁴Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 53.

⁵⁵Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 54.

Makassar merambat dari selatan ke utara saat air pasang dan kembali ke selatan saat air surut. Tipe pasang surut Kota Makassar adalah campuran, condong ke harian tunggal dengan bentuk topografi dasar laut landai.

b. Arus

Secara umum, arus di Selat Makassar mengalir ke Selatan sepanjang tahun. Aliran arus ini di alihkan ke timur sepanjang Pantai Barat daya Sulawesi selama musim hujan. Pada musim kemarau, arus tersebut dialihkan ke barat karena ada arus balik dari Paparan Sunda. Di paparan yang dangkal dari Kepulauan Spermonde arus mengalir relatif deras ke arah selatan pada musim hujan dan melemah ke arah barat daya pada musim kemarau. Sedangkan dari hasil simulasi kecepatan arus susur pantai sebagian besar berada pada interval 0,051 sampai 0,10 m/det (76,79%) kemudian pada interval 0,11 sampai 0,15 m/det (22,32%) dan sebagian kecil terjadi pada kecepatan lebih besar dari 2 m/det (15,6%).

c. Gelombang/ombak

Kondisi gelombang di perairan Kota Makassar dipengaruhi oleh angin yang tertiup melalui Selat Makassar dan membentuk pola sesuai dengan arah angin. Arah gelombang cenderung dari arah Barat, Barat Laut, dan Barat

Daya kemudian terefraksi hingga sepanjang pantai bahkan sampai pada muara Sungai Tallo dengan tegak lurus arah normal pantai. Pada saat musim barat, perairan Makassar khususnya menerima hempasan ombak yang terbangkit oleh hembusan angin yang dominan dari arah barat daya, barat, dan barat laut.⁵⁶

Ombak yang terbangkit oleh angin yang datang dari arah barat dan barat daya akan menginduksi arus susur pantai ke arah utara, sebaliknya ombak yang terbangkit oleh angin yang datang dari barat laut akan menginduksi arus susur pantai ke arah selatan hingga mempengaruhi kondisi muara Sungai Jene'berang yang berada di bagian selatan dari Pantai Losari Makassar.

f. Persampahan

Masalah sampah merupakan isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat. Adanya pola konsumsi masyarakat yang tidak berwawasan lingkungan seperti penggunaan kemasan makanan berbahan kertas, plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya yang sulit didegradasi berdampak pada kerusakan lingkungan. Persoalan sampah terjadi akibat belum ada kebijakan yang bersifat menyeluruh dan konsisten dalam pengelolaan

⁵⁶Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 55.

sampah perkotaan. Penanganan masalah sampah masih bersifat sementara. Sistem pelayanan pembuangan sampah di Kota Makassar saat ini sudah dilayani oleh armada sampah yang pengelolaannya berada di bawah naungan Dinas Kebersihan Kota Makassar, mulai dari daerah pemukiman, daerah perdagangan, pusat pemerintahan, lokasi kegiatan sosial, dan pendidikan.⁵⁷

2. Gambaran umum Ruang Terbuka Hijau

a. Definisi Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (*endemic, introduksi*) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.⁵⁸

Berdasarkan bobot kealamiahannya, bentuk RTH dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan Bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olahraga, dan pemakaman). Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasikan menjadi

⁵⁷Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 57.

⁵⁸Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, , h. 23.

dua bentuk yaitu Bentuk RTH kawasan (areal, non linear), dan bentuk RTH jalur (koridor, linear).

b. Fungsi dan Manfaat RTH

Ruang Terbuka Hijau, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi ekonomi. Dalam satu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota.

RTH berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara visi, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk perlindungan sumber daya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat kehidupan liar.

RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota.⁵⁹

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung

⁵⁹Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 24.

(berjangka panjang dan bersifat *intangible*) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati.

Gambar 1.1 Tipologi RTH

Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
	Estetika	Sosial Budaya	Pola Planologis	RTH Privat
		Estetika Ekonomi		

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taan nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

Multi fungsi penting RTH ini sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah

banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu kota tropis yang panas terik. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lain-lain.

Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger (*landmark*) kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH dapat juga memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.⁶⁰

1. Pola dan Struktur Fungsional

Pola RTH kota merupakan struktur RTH yang ditentukan oleh hubungan fungsional (ekologis, sosial, ekonomi, arsitektural) antara komponen pembentuknya. Pola RTH terdiri dari RTH struktural dan RTH non struktural.

RTH struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan fungsional antar komponen pembentuknya yang mempunyai pola hierarki planologis yang bersifat antroposentris. RTH tipe ini didominasi oleh fungsi-fungsi ekologis dengan struktur RTH binaan

⁶⁰Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, 26.

yang berhierarki. Contohnya adalah struktur RTH berdasarkan fungsi sosial dalam melayani kebutuhan rekreasi luar ruang (*outdoor recreation*) penduduk perkotaan seperti yang diperlihatkan dalam urutan hierarki sistem pertamanan kota (*urban park sistem* yang dimulai dari taman perumahan, taman lingkungan, taman kecamatan, taman kota, taman regional, dst).

RTH non struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan fungsional antar komponen pembentuknya yang umumnya tidak mengikuti pola hierarki palnologis karena bersifat ekosentris. RTH tipe ini memiliki fungsi ekologis yang sangat dominan dengan struktur RTH alami yang tidak berhierarki. Contohnya adalah struktur RTH yang dibentuk oleh konfigurasi ekologis bentang alam perkotaan tersebut, seperti RTH kawasan lindung, RTH perbukitan yang terjadi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan danau, RTH pesisir. Untuk suatu wilayah perkotaan, maka pola RTH tersebut dapat dibangun dengan mengintegrasikan dua pola RTH ini berdasarkan bobot tertinggi pada kerawanan ekologis kota (tipologi alamiah kota: kota lembah, kota pegunungan, kota pantai, kota pulau, dll) sehingga dihasilkan suatu pola RTH struktural.

2. Jenis, Fungsi, dan Tujuan Pembangunan RTH

Tabel 1.2
Jenis, Fungsi, dan Tujuan Pembangunan RTH⁶¹

JENIS RTH	FUNGSI	TUJUAN	KETERANGAN
-----------	--------	--------	------------

⁶¹Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 35.

	LAHAN		
TAMAN KOTA (termasuk: Taman Bermain Anak/Balita), Taman Bunga, (Lansia).	Ekologis, Rekreatif, Estetis, Olahraga (terbatas).	Keindahan (tajuk, tegakan pengarah, pengaman, pengisi dan pengalas), kurangi cemaran, meredam bising, perbaiki iklim mikro, daerah resapan, peyangga, sistem kehidupan, kenyamanan.	Mutlak dibutuhkan bagi kota, keserasian, rekreasi aktif dan pasif, nuansa rekreatif, terjadinya keseimbangan mental (psikologis) dan fisik manusia, habitat, keseimbangan ekosistem.
JALUR (tepi) SEMPADAN SUNGAI dan PANTAI	Konservasi, pencegah Erosi, penelitian.	Perlindungan, mencegah okupansi penduduk, mudah menyebabkan erosi, iklim mikro, penahan badai.	Perlindungan total tepi kiri-kanan bantaran sungai (+/- 25-50 meter) rawan erosi. Taman laut.
TAMAN OLAHRAGA, BERMAIN, RELAKSASI	Kesehatan, Rekreasi.	Kenikmatan, pendidikan, Kesenangan, kesehatan, Interaksi, kenyamanan.	Rekreasi aktif, sosialisasi, mencapai prestasi, menumbuhkan kepercayaan diri.
TAMAN PEMAKAMAN (UMUM)	Pelayanan publik, (umum), keindahan.	Pelindung, pendukung ekosistem makro, ventilasi dan pemersatu ruang kota.	Dibutuhkan seluruh anggota masyarakat, menghilangkan rasa angker.
PERTANIAN KOTA	Produksi, Estetika, Pelayanan publik (umum).	Kenyamanan spasial, Visual, audial dan thermal, ekonomi.	Peningkatan produktivitas budidaya tanaman pertanian.
TAMAN (HUTAN) KOTA/ PERHUTANAN	Konservasi, Pendidikan, Produksi.	Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota, wisata alam, rekreasi, produksi hasil hutan iklim mikro, oksigen, ekonomi.	Pelestarian, perlindungan, Dan pemafaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati, pendidikan penelitian.
TAMAN	Konsevasi,	Keseimbangan	Pelestarian SD-air,

SITU, DANAU, WADUK, EMPANG	Keamanan.	ekosistem, rekreasi (pemancingan).	flora dan fauna (budidaya ikan air tawar).
KEBUN RAYA, KEBUN BINATANG (Nursery)	Konservasi, Pendidikan, Penelitian.	Keseimbangan ekosistem, Rekreasi, ekonomi.	Pelestarian plasma nutfah, elemen khusus kota Besar, kota Madya.
TAMAN PURBAKALA	Konservasi, Preservasi, Rekreasi.	Reservasi, perlindungan situs, sejarah – national <i>Character building</i> .	Bangunan sebagai elemen taman.
JALUR HIJAU PENGAMAN AN	Keamanan	Penunjang iklim mikro, Thermal, estetika.	Pengamanan, jalur lalu-lintas, Rel kereta api, jalur listrik tegangan tinggi, kawasan industri, dan lokasi berbahaya lain.
TAMAN RUMAH (sekitar bangunan Gedung bertingkat) PEKARANG AN	Keindahan, Produksi.	Penunjang iklim mikro, pertanian subsistem, TOGA (tanaman obat keluarga)/ Apotik Hidup, Karangkitri (sayur dan buah- buahan)	Pemenuhan kebutuhan pribadi (privacy), penyaluran hobi pada lahan terbatas, mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara berkata dan subsisten.

B. Konsistensi pemerintah dalam implementasi kebijakan terhadap ruang terbuka hijau di kota Makassar (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau)

Hingga saat ini. Lingkungan Hidup masih menjadi hal yang dilematis bagi Indonesia. Ini disebabkan karena di satu sisi masalah tersebut senantiasa berdampak luas di berbagai aspek-aspek kehidupan rakyat, bahkan seluruh umat manusia, pada sisi lain gangguan atau bahkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerap dianggap sebagai keniscayaan yang tak

terelakkan dalam pembangunan yang selalu diyakini akan bermuara para peningkatan taraf kehidupan seluruh rakyat.⁶²

Kerusakan lingkungan hidup sendiri dapat diakibatkan berbagai kegiatan, baik dalam skala terbatas (sempit) maupun dalam skala luas. Dalam skala terbatas, misalnya, kegiatan keluarga yang menghasilkan limbah rumah tangga. Limbah ini belum menjadi sorotan masyarakat, khususnya di Negara-negara berkembang karena semua keluarga menghasilkannya dan dampaknya tidak secara nyata mengganggu kesehatan.⁶³ Dalam skala luas, masalah lingkungan menjadi penting karena komponen menanggung dampak begitu banyak, sedangkan pihak penyebab dampak diuntungkan secara ekonomi. Pada umumnya, masalah lingkungan hidup disebabkan oleh peristiwa alam, pertumbuhan penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, industrialisasi dan transportasi.

Bagi Indonesia, persoalan lingkungan hidup sebenarnya bukan persoalan yang baru. Karena sejak lingkungan hidup menjadi isu yang menarik perhatian dunia ini ditandai dengan penyelenggaraan Konferensi Lingkungan Hidup se Dunia tahun 1972, Indonesia telah meresponnya antara lain dengan pencantunan soal lingkungan hidup dalam GBHN 1973-1979.⁶⁴

Untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pemerintah tidak hanya memasukkan aspek lingkungan hidup dalam GBHN (garis-garis besar haluan Negara), tetapi juga membentuk

⁶²Lukman f. Mokoginta. *Bumi Bukan Milik Kapitalis*. h. 16.

⁶³K.E.S. Manik. *Pengelolaan lingkungan hidup*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, (cetakan ke-1), h. 53.

⁶⁴Lukman f. Mokoginta. *Bumi Bukan Milik Kapitalis*. h. 16.

lembaga yang membidani lingkungan hidup, respon pemerintah dapat dilihat dari:

1. Sejak cetakan ke-1 1973, aspek lingkungan masuk dalam GBHN.
2. Pada 1978, dibentuk menteri Negara pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup (PPLH).
3. Pada 1982, menteri Negara PPLH diubah menjadi menteri Negara kependudukan dan lingkungan hidup.
4. Pada 1993, menteri Negara KLH diubah menjadi menteri lingkungan hidup (LH)
5. Di setiap provinsi masalah lingkungan hidup dikoordinasikan oleh biro bina lingkungan hidup (BLH). Sejak 1998 biro BLH diganti dengan Bapedalda (badan pengendalian dampak lingkungan daerah)
6. Pada 1990, dibentuk badan pengendalian dampak lingkungan (Bapedal) pusat, yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan secara nasional.

Untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan serasi, telah dirumuskan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang RI nomor 4 tahun 1982 tanggal 4 maret 1982, yang direvisi dengan undang-undang nomor 23 tahun 1997 tanggal 9 september 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup kemudian diperbaharui dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tanggal 9 oktober 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Undang-Undang RI nomor 24 tahun 1992 tanggal 13 oktober 1992 tentang penataan ruang.⁶⁵

Akan tetapi, dalam rentang waktu yang relative cukup panjang dalam soal pengelolaan lingkungan, Indonesia tampak belum juga menunjukkan kemajuan yang berarti. Bahkan sebaliknya, bahkan yang tampak adalah eskalasi kerusakan lingkungan, akibat pemanfaatan sumber daya alam secara semena-mena untuk kepentingan jangka pendek.⁶⁶

Melihat hal ini pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dengan undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.⁶⁷

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 26 2007 tentang penataan ruang ini ditopang oleh Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Selain itu dalam implementasi undang-undang no. 26 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar kemudian ditopang oleh perda no. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan juga peraturan Walikota Makassar nomor 69 tahun 2016 tentang izin pemanfaatan, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. selain itu

⁶⁵K.E.S. Manik. *Pengelolaan Llingkungan Hidup*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, cetakan ke-1), h. 20.

⁶⁶Lukman f. Mokoginta. *Bumi Bukan Milik Kapitalis*. h. 16.

⁶⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

RTH juga sudah ditegaskan dalam Perda No. 4 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang dan wilayah kota Makassar bahkan sebelumnya sudah diatur dalam perda RTRW Kota Makassar No. 6 Tahun 2006.

“Dalam mewujudkan RTH Pemerintah Kota Makassar merumuskan beberapa aturan baik berupa perda maupun perwali. Diantaranya: perda no. 3 tahun 2007 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan juga peraturan walikota Makassar nomor 69 tahun 2016 tentang izin pemanfaatan, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. selain itu RTH juga sudah ditegaskan dalam perda no. 4 tahun 2015 tentang rencana tata ruang dan wilayah kota Makassar bahkan sebelumnya sudah diatur dalam perda RTRW kota makassar no. 6 tahun 2006. Dengan adanya aturan ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam meningkatkan maupun mengelolah RTH. Aturan ini kemudian sangat penting untuk diimplementasikan karena itu sangat penting dalam terwujudnya RTH di kota Makassar”.⁶⁸

Dalam Peraturan Walikota Makassar No. 69 Tahun 2016 tentang izin pemanfaatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan peraturan daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau disebutkan adanya proses penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. meliputi: perencanaan pemanfaatan, pengawasan dan pendelegasian, serta evaluasi. Selain yang disebutkan di atas juga dijelaskan mengenai pembuatan beberapa RTH baru, pemeliharaan, pengamanan dan pemanfaatan, pengendalian larangan, perizinan dan bagaimana peran masyarakat, swasta, maupun pemerintah sendiri. Hal ini ditegaskan dalam wawancara berikut.

“Ada beberapa ruang lingkup dalam mengembangkan RTH yang terdapat dalam Dalam peraturan Walikota Makassar no. 69 tahun

⁶⁸Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017.

2016 tentang izin pemanfaatan yaitu perencanaan, pengelolaan, perizinan dan pengawasan.”⁶⁹

Ruang lingkup pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH meliputi:

1. Perencanaan

RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kota.

- a. Luas RTH mencakup RTH publik dan privat;
- b. Luas RTH penyediaannya paling sedikit 20% dari luas wilayah kota untuk RTH publik dan 10% dari luas wilayah kota untuk RTH privat;
- c. Luas RTH publik penyediaannya sebesar 10% dari luasan untuk kawasan daerah yang sudah terbangun, 20% dari luasan untuk kawasan daerah yang belum terbangun dan 30% untuk kawasan reklamasi;
- d. Luas RTH privat penyediaannya sebesar 20% dari luasan kawasan daerah yang sudah terbangun, yang belum terbangun dan reklamasi;
- e. Luas RTH publik penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta dapat dikerjasamakan dengan masyarakat, BUMN, BUMD dan pihak/lembaga swasta.
- f. Luas RTH privat penyediaannya menjadi tanggung jawab perseorangan, masyarakat, BUMN, BUMD dan pihak/lembaga swasta.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan penghijauan, pembangunan baru, pemeliharaan dan pengamanan ruang terbuka hijau.

⁶⁹Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017

3. Perizinan

1. Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH dan/atau menebang pohon dan/atau memindahkan taman wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Izin hanya dapat diberikan apabila:
 - a. Mengganggu jaringan utilitas kota dan atau lingkungan sekitar; dan
 - b. Pada atau disekitar lokasi pohon yang ditebang dan atau taman yang dipindahkan akan didirikan suatu bangunan dan/atau gang (jalan masuk untuk keperluan pemerintah, badan atau perorangan.

g. Pengawasan

1. Pengawasan pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan oleh SKPD di bidang Lingkungan hidup.
2. Pemantauan izin pemanfaatan, penataan, dan pengelolaan RTH dilakukan oleh SKPD di bidang Lingkungan Hidup dengan berkoordinasi dengan SKPD Terkait.⁷⁰

Adanya kebijakan diatas tentunya diharapkan mampu meningkatkan jumlah dan kualitas RTH yang ada di Kota Makassar dengan cara imlementasi kebijakan dengan konsisten. Implementasi kebijakan merupakan tahapan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahapan ini menentukan apakah kebijakan pemerintah benar aplikable dilapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti

⁷⁰Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Izin Pemanfaatan, Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar

yang direncanakan. Hal serupa juga dikatakan oleh Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.⁷¹

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Sama halnya kebijakan mengenai RTH yang terdapat dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Makassar merupakan RTH kota yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi (endamik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk

⁷¹Budi Winarno, *Kebijakan Publik, dan Proses* (Jakarta; PT. Buku Kita, 2008), h. 177.

kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Untuk memperoleh target 30 % RTH tentunya diperlukan konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang RTH. Mengingat jumlah RTH di Kota Makassar masih sangat rendah tentunya sangat mempengaruhi kondisi keseimbangan lingkungan. Hal ini juga ditegaskan dalam wawancara dengan direktur Walhi sebagai berikut :

“Komitmen dan konsistensi pemerintah Kota Makassar sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan Undang-Undang no. 26 tahun 2007 tentang RTH demi meningkatkan ataupun mengelola RTH, mengingat pertumbuhan penduduk kota Makassar sangat pesat dan kebutuhan lahan untuk membangun rumah semakin meningkat, selain itu bertambahnya jumlah kendaraan dan industrialisasi menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Sedangkan RTH di Kota Makassar masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu hanya kurang lebih 7% dari 30% yang dibutuhkan.”⁷²

Berdasarkan hasil identifikasi RTH melalui aplikasi ArcGIS dengan menggunakan Citra Satelit Geoeye resolusi tinggi serta diklarifikasi dengan metode survey lapangan, maka diperoleh hasil identifikasi RTH Kota Makassar tahun 2016 sebagai berikut. Jenis RTH yang ada di Kota Makassar yaitu:

a. RTH Taman Kota

RTH Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Secara ekologis taman kota berfungsi sebagai penjaga kualitas lingkungan kota. Taman kota juga dapat

⁷² Asmar Ekswar, Direktur Walhi Sul-Sel, Wawancara di Kantor Walhi Tanggal 09 Februari 2018.

berfungsi sebagai filter berbagai gas pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim mikro.

Tersedianya lahan yang teduh sejuk dan nyaman, mendorong warga kota dapat memanfaatkan tempat berolah raga dan rekreasi dengan berjalan kaki setiap pagi, olah raga dan bermain, dalam lingkungan kota yang benar-benar asri, sejuk, dan segar sehingga dapat menghilangkan rasa capek. Taman kota yang rindang mampu mengurangi suhu lima sampai delapan derajat Celsius, sehingga terasa sejuk. Kondisi yang ramai ini mengundang banyak asongan untuk menjajankan makanannya, namun tentunya harus diatur dan ditertibkan.⁷³ Selain itu RTH taman kota memiliki fungsi lain seperti yang terdapat dalam wawancara berikut.

“Pembangunan RTH untuk taman dapat dioptimalkan fungsinya sebagai paru-paru kota dan sebagai kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota, pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati. Taman ini ada di beberapa wilayah seperti yang ada di Manggala, Tamalanrea dan banyak lagi daerah lainnya.”⁷⁴

Selain itu RTH taman Kota sering juga dikatakan sebagai RTH publik yang memiliki fungsi sosial seperti yang dipaparkan dalam wawancara berikut.

“Taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik tentu akan menjadikan lokasi ini ramai dikunjungi banyak orang. Mereka datang melakukan aktivitas yang berbeda-beda, misal ada yang sekedar membaca buku sambil duduk di bawah pohon, jogging, dan mungkin ada yang datang ke taman kota dalam misi untuk berdagang. Taman kota sebagai ruang publik ibarat suatu wadah di mana di dalamnya terjadi interaksi sosial. Taman kota

⁷³Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 31.

⁷⁴Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017

merupakan bentuk fasilitas sosial yang dikelola pemerintah kota sehingga taman merupakan fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah kota. Taman kota dapat diakses oleh semua warga tanpa ada pungutan biaya.”⁷⁵

b. RTH Hutan Kota

Hutan kota merupakan suatu ekosistem dan tidak sama dengan pengertian hutan selama ini. Hutan kota adalah komunitas tumbuh-tumbuhan berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol (menumpuk) dengan struktur meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman, dan estetis.

Hutan Kota dapat memberikan kota yang nyaman sehat dan indah (estetis). Kita sangat membutuhkan hutan kota, untuk perlindungan dari berbagai masalah lingkungan perkotaan. Hutan kota mempunyai banyak fungsi (kegunaan dan manfaat). Hal ini tidak terlepas dari peranan tumbuh-tumbuhan di alam. Adapun cara penyediaan jenis RTH ini seperti yang ditegaskan dalam wawancara berikut.

“Untuk mengoptimalkan penyediaan RTH hutan kota wajib mempertimbangkan karakteristik kawasan dan fungsi/peruntukan kawasan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas. Hutan Kota ada di beberapa wilayah Kota Makassar diantaranya ada di Tamalanrea.”⁷⁶

⁷⁵ Asmar Ekswar, Direktur Walhi Sul-Sel, Wawancara di Kantor Walhi Tanggal 09 Februari 2018

⁷⁶ Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017.

Dengan beberapa cara diatas diharapkan mampu menyediakan hutan kota yang memiliki banyak manfaat bagi perkotaan seperti menjaga kasimbangan lingkuan. Hal ini juga ditegaskan dalam wawancara berikut.

“Tentunya RTH jenis ini sangat memberikan manfaat khususnya di Kota Makassar yang dipadati penduduk dan kendaraan yang menciptakan polusi khususnya menjaga kelestarian, keasrian dan keseimbangan ekosistem dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.”⁷⁷

Pembangunan jenis RTH ini kadang memiliki kendala tersendiri, Kendala tersebut antara lain berkisar kepada persediaan lahan untuk hutan kota, lahan semakin hari semakin sedikit untuk hutan kota dan harga lahan di kota semakin hari semakin mahal. Disamping itu pula terbentur kepada persepsi dari para perancang dan pelaksana pembangunan, maupun dari lapisan masyarakat lainnya terhadap hutan kota belum sama dan belum terbangun. Melihat fungsinya maka kita harus membangun dan mengembangkan hutan kota.

c. RTH Jalur Hijau Jalan

RTH Jalur Hijau Jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua jalur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman. Daerah sisi jalan adalah daerah yang berfungsi untuk keselamatan dan

⁷⁷ Asmar Ekswar, Direktur Walhi Sul-Sel, Wawancara di Kantor Walhi Tanggal 09 Februari 2018.

kenyamanan pemakai jalan, lahan untuk pengembangan jalan, kawasan penyangga, jalur hijau, tempat pembangunan fasilitas pelayanan dan melindungi bentukan alam. Hal ini juga ditegaskan dalam wawancara berikut.

“Jenis RTH ini memberikan keindahan dan dan juga jalur pemisah jalan, jenis RTH ini bisanya ditanami bunga baik secara langsung atau di letakkan pot di sepanjang jalur jalan. Untuk menjaga keberadaan RHT ini dilakukan pengawasan ataupun pergantian bunga atau pohon yang sudah layu atau mati.⁷⁸

Permasalahan dalam RTH jenis ini seringkali ada perbedaan persepsi masyarakat, perilaku buruk, serta merebaknya PKL tanpa ada aturan khusus yang mengatur. Permasalahan yang berkaitan dengan jalur hijau jalan adalah kurang adanya pemeliharaan yang baik, serta perencanaannya cenderung mengutamakan faktor estetika daripada fungsinya.

Jalur hijau merupakan RTH yang memanjang baik yang berada di sisi jalan maupun pemisah atau media jalan. Penanaman jalur hijau jalan merupakan hal penting dalam merancang dan mengelolah ruang serta memecah masalah. Vegetasi merupakan faktor penting dalam lingkungan sehingga pemilihan vegitasi harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan karakteristik vegetasi yang ditanam, terutama untuk jalur hijau di lingkungan perkotaan yang berada di lingkungan yang penuh polusi dan keadaan yang kurang mendukung. Pemilihan tanaman untuk suatu lanskap haru memperhatikan aspek agronomis,

⁷⁸ Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017.

arsitektural tanaman dan nilai identitas tertentu, misalnya tanaman langkah, unik, eksklusif dan lainnya.

d. Taman Bermain

Taman bermain adalah salah satu jenis RTH yang sangat penting sebagai sarana rekreasi dan juga sekaligus sarana dimana masyarakat dari golongan manapun dapat menikmatinya. Taman bermain sendiri ada beberapa di Kota Makassar diantaranya di Manggala tepatnya di Lasuloro, Taman Bontoala dan beberapa taman yang lainnya. Taman ini juga biasa di manfaatkan sebagai tempat Rekrasi dihari libur. ruang bermain merupakan tempat dimana anak-anak tumbuh dan mengembangkan intelegensinya. Tempat dimana mereka membuat kontak dan proses dengan lingkungan, serta membantu sistem sensor dan proses otak secara keseluruhan. Dari tempat bermain pula, anak belajar sportivitas, disiplin dan mengembangkan kepribadiannya. Hal ini juga ditegaskan dalam wawancara berikut.

“Untuk mengembangkan penatagunaan lahan dan penyediaan sarana prasarana untuk bersosialisasi dan bermain khususnya bagi anak-anak mengingat kurangnya taman yang tersedia di Kota Makassar yang begitu padat. dan juga dalam rangka peningkatan standar kualitas lingkungan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas Daerah.”⁷⁹

Ruang bermain pada ruang terbuka tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh anak saja, tapi juga untuk berbagai kalangan. Meski begitu, sebenarnya anak-anak tetap membutuhkan ruang bermain

⁷⁹ Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017

husus yang sifatnya terbuka dan memang benar-benar ditujukan untuk mereka. Minimnya ruang bermain anak di perkotaan tercermin dari banyaknya anak-anak yang bermain di tempat- tempat yang bukan semestinya tempat bermain seperti di jalanan, bantaran kali, dan tempat yang kurang pas. Trend yang berkembang saat ini memang permainan anak-anak yang sifatnya di ruang terbuka akhirnya tidak populer dan mendorong anak-anak menjadi cenderung pasif dan individualis.

Situasi yang memprihatinkan ini memaksa anak-anak bermain di tempat bermain khusus dan tidak menggunakan tempat bermain di ruang terbuka yang merupakan sebuah ruang publik yang nyaman, karena memang tidak ada lagi ruang terbuka untuk bermain. Sering kita lihat banyak anak-anak bermain bola di jalanan beraspal, yang membahayakan nyawa mereka. Berkurangnya ruang terbuka publik ini tidak saja merupakan persoalan pakar lingkungan, tetapi menjadi beban psikologis masyarakat kota akan kebutuhan ruang sebagai aktualisasi diri.

Maraknya pembangunan gedung (mall, ruko, kantor) semakin meminggirkan anak-anak yang sangat membutuhkan ruang terbuka hijau untuk tempat bermain. Kecenderungan anak-anak untuk memilih permainan modern yang tidak menuntut ruang spasial khusus bagi mereka tentu akan mempengaruhi psikologis perkembangan mereka nanti. Buruknya perkembangan ini pada anak tidak terlepas pada

kemampuan pemerintah menyediakan ruang bermain khusus bagi anak tersebut.

e. Lapangan

Lapangan adalah Kawasan Hijau kegiatan Olahraga, tergolong ruang terbuka hijau area lapangan, yaitu lapangan, lahan datar atau pelataran yang cukup luas. Bentuk dari ruang terbuka ini yaitu lapangan olahraga, stadion, lintasan lari atau lapangan golf dan sebagainya.

Jenis RTH ini ada di Kota Makassar dan memiliki banyak fungsi, yaitu RTH dengan keterlaksanaan fungsi sosial yang paling aktif atau terlaksana setiap hari baik itu berolahraga, belajar ataupun aktifitas lainnya. Hal ini juga dipertegas dalam wawancara berikut.

“Lapangan adalah salah satu jenis RTH yang memiliki fungsi dominan khususnya fungsi sosial. Baik itu berolah raga, belajar ataupun bermain. Ada beberapa lapangan yang menjadi faforit bagi masyarakat Kota Makassar diantaranya, Lapangan Karabosi, dan Lapangan A. Mattalatta.”⁸⁰

Selain berfungsi sebagai sarana olahraga juga sering digunakan dalam berbagai acara seperti konser, ibadah dan pasar malam. Untuk pemanfaatan dalam acara tersebut harus ada izin untuk menghindari terjadinya kerusakan setiap pemanfaatan dari yang berwenang. Hal ini ditegaskan dalam wawancara berikut.

Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH wajib mendapat izin dari Walikota atau

⁸⁰ Asmar Ekswar, Direktur Walhi Sul-Sel, Wawancara di Kantor Walhi Tanggal 09 Februari 2018.

Pejabat yang ditunjuk. Dalam surat permohonan izin harus menyebut tujuan dan/atau alasan-alasan pemanfaatan RTH.⁸¹

Berkeenaan dengan semakin padatnya aktifitas masyarakat maka semakin banyak pula RTH yang dibutuhkan khususnya yang bisa digunakan sebagai sarana sosialisasi, dalam penggunaannya kadang diahli fungsiskan dari RTH publik menjadi RTH komersial seperti yang terjadi di lapangan Karabosi, diamana awalnya lapangan ini dapan diakses oleh publik kemudian dikomersilkan. Hal ini tentunya tak lepas dari peran pemerintah memberi izin kepada para pemilik modal untuk mengelolah dengan alasan kesejahteraan rakyat.

f. Bakau

Hutan bakau adalah sejenis hutan yang tumbuh dan berkembang di kawasan pinggir pantai dan muara-muara sungai. Hutan bakau memiliki fungsi serta tujuan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Pohon-pohonnya mempunyai akar-akar tunjang untuk bernafas. Akarnya melengkung dan mencuat ke atas sehingga tidak selamanya terendam air. Lingkungan fisik tempat tumbuhnya hutan bakau meliputi daerah pasang surut sampai airnya asin dan tanahnya berlumpur.

RTH bakau memiliki fungsi yang sama dengan RTH sempadan sungai, dan RTH sempadan pantai, Dari segi ekonomi, hutan mangrove menghasilkan beberapa jenis kayu yang berkualitas baik, dan juga hasil-hasil non-kayu atau yang biasa disebut dengan Hasil Hutan Bukan

⁸¹ Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017

Kayu, berupa arang kayu; tanin, bahan pewarna dan kosmetik serta bahan pangan dan minuman.

Manfaat yang lebih penting dari hutan bakau adalah fungsi ekologisnya sebagai pelindung pantai, habitat berbagai jenis satwa, dan tempat pembesaran (*nursery ground*) banyak jenis ikan laut. Fungsi Jenis RTH ini berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap bencana erosi seperti yang ditegaskan dalam wawancara berikut.

“RTH Bakau fungsinya dapat dioptimalkan dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap bencana erosi dan gelombang laut serta menjaga daerah resapan air dan kelestarian sumber air baku. Selain itu RTH Bakau ini dijadikan sebagai destinasi wisata.”⁸²

Salah satu Hutan bakau di Makassar terletak di Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, sisi kiri jalan tol jika kita dari arah kota. Hutan bakau di sini memanjang sekira 2 kilometer ke laut lepas, tepat menghadap ke Selat Makassar. Meski terkesan luas, namun kawasan yang diapit Sungai Tallo dan Sungai Maros ini masih butuh penanaman lagi. Keberadaan Hutan Bakau di lantebung ini juga dijadikan sebagai destinasi wisata yang terus dikembangkan oleh pemerintah dan juga bekerja sama dengan masyarakat setempat.

Melihat manfaat dari hutan Bakau ini tentunya diperlukan pengembangan hutan bakau di Kota Makassar hal ini beriringan dengan pesatnya reklamasi pantai dan juga pembuatan tambak ikan yang harus

⁸² Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017

mengorbankan hutan bakau. Pesatnya Reklamasi pantai dan pembangunan tambak ikan tentunya mengancam keberadaan Hutan Bakau di Kota Makassar, hal ini juga ditegaskan dalam wawancara berikut.

“Hutan bakau di sebagian besar kawasan pesisir Kota Makassar terancam hilang. Salah satu penyebab, konversi lahan mangrove menjadi tambak makin meluas dan Reklamasi pantai yang sangat pesat. Pemerintah dinilai memiliki andil besar mendorong degradasi ini melalui berbagai kebijakan yang cenderung mendukung dan memanjakan para petambak dan juga para pengembang.”⁸³

Kurangnya hutang mangrove tentunya mempunya dampak khususnya dampak ekologis adalah hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove, yang dalam jangka panjang akan mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove khususnya dan ekosistem pesisir umumnya. Selain itu, menurunnya kualitas dan kuantitas hutan mangrove telah mengakibatkan dampak yang sangat mengkhawatirkan, seperti abrasi yang selalu meningkat, penurunan tangkapan perikanan pantai, intrusi air laut yang semakin jauh ke arah darat, malaria dan lainnya.

Untuk lebih jelasnya dibawa ini saya paparkarkan data lengkap mengenai RTH yang tersedia di Kota Makassar secara keseluruhan baik dari jenis, lokasi maupun luasnya. Data dibawa ini tentunya mampu memberikan gambaran keberadaan RTH yang ada di Kota Makassar.

⁸³ Asmar Ekswar, Direktur Walhi Sul-Sel, Wawancara di Kantor Walhi Tanggal 09 Februari 2018.

Tabel 1.3
Hasil Identifikasi RTH Kota Makassar Tahun 2016⁸⁴

No	Jenis RTH	Lokasi	Kecamatan	Luas (Ha)
0	Taman Bermain	Lasuloro 1	Manggala	0,1
1	Lapangan	Pattunuang 2	Manggala	0,1
2	Lapangan	Kajenjeng	Manggala	0,2
3	Taman	Komp.Graha Family	Manggala	0,0
4	Taman	Garuda 1	Mariso	0,0
5	Taman	Topaz	Panakkukang	0,0
6	Taman	Masjid 45 Urip	Panakkukang	0,2
7	Taman	Rumkit Sina Urip	Panakkukang	0,1
8	Taman	UT Urip	Panakkukang	0,1
9	Taman	Unibos Urip	Panakkukang	0,5
10	Taman	Komp.Griya Alam Permai	Tamalanrea	0,0
11	Taman	BTN Hartaco	Tamalate	0,2
12	Lapangan	Toddopuli 10 Baru	Manggala	0,1
13	Taman	Perm.Puri Taman Sari	Manggala	0,0
14	Taman	Alauddin	Tamalate	0,2
15	Taman	Alauddin	Tamalate	0,0
16	Taman	Alauddin	Tamalate	0,0
17	Taman	Alauddin	Tamalate	0,1
18	Taman	Samping Unifa	Panakkukang	0,3
19	Taman	Komp.Bukti Baruga	Manggala	6,9
20	Bakau		Tamalanrea	7,7
21	Lapangan	Metro Tanjung Bunga	Tamalate	1,7
22	Bakau		Panakkukang	1,1
23	Bakau		Tamalanrea	6,0
24	Lapangan	Universitas Hasanuddin	Tamalanrea	2,7
25	Hutan Kota	Universitas Hasanuddin	Tamalanrea	1,3
26	Hutan kota	Universitas Hasanuddin	Tamalanrea	1,9
27	Hutan Kota	Universitas Hasanuddin	Tamalanrea	2,0
28	Hutan Kota	Universitas Hasanuddin	Tamalanrea	2,8
29	Hutan Kota	Universitas Hasanuddin	Tamalanrea	0,1
30	Hutan Kota	Universitas Hasanuddin	Tamalanrea	3,1
31	Hutan Kota	Universitas Hasanuddin	Tamalanrea	0,4
32	Taman	Perintis Kemerdekaan Km 10	Tamalanrea	0,2
33	Hutan Kota	Universitas Hasanuddin	Tamalanrea	3,0
34	Taman	Politeknik Negeri	Tamalanrea	0,5

⁸⁴ Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 59.

35	Lapangan	Dinas PU Provinsi Sulsel	Panakukang	0,8
36	Taman	Minasa Upa AB	Rappocini	0,2
37	Lapangan	Perumnas Antang Blok 10	Manggala	0,1
38	Jalur Tengah	Gunung Lokon	Makassar	0,1
39	Taman	Kampus Amkop	Panakkukang	0,3
40	Taman	Meranti	Manggala	0,0
41	Taman	Peum.Greend Residence	Manggala	0,0
42	Lapangan	BTN MangasaPermai		0,1
43	Taman	Sekolah Alam Bosowa		0,2
44	Taman	Perumahan Amarylis Tanjung Bunga	Tamalate	0,3
45	Taman	Perumahan Espana	Tamalate	0,1
46	Lapangan	Kantor LPM Kapasa	Tamalanrea	0,0
47	Taman	Puskesmas Kapasa	Tamalanrea	0,0
48	Lapangan	Biring Romang	Tamalanrea	0,2
49	Taman	Perumahan St.Alauddin III	Tamalate	0,1
50	Taman	St.Alauddin Raya	Rappocini	0,1
51	Taman	SPBU Alauddin	Rappocini	0,1
52	Taman	Unismuh Alauddin	Rappocini	0,1
53	Taman	Perpustakaan Wilayah Alauddin	Rappocini	0,1
54	Taman	Pusat Kajian Bahasa	Tamalate	0,4
55	Taman	Jl.Toddopuli 1B	Rappocini	0,0
56	Taman	Jl.Pinang Raja	Rappocini	0,1
57	Taman	SD Ikip Jl.Pettarani	Rappocini	0,0
58	Taman	Kantor Imigrasi Jl.Perintis Kemerdekaan	Tamalanrea	0,1
59	Taman	Kampus UKIP Jl.Perintis Kemerdekaan	Tamalanrea	0,1
60	Taman	Jl.Dr.W.Sudirohusodo	Wajo	0,0
61	Taman	TVRI Jl.Kakatua	Mariso	0,2
			Total	47,7

Hasil identifikasi menunjukkan beberapa RTH yang dapat dikenal lewat intrpretasi melalui Citra Satelit *Geo Eye* resolusi tinggi merupakan jenis RTH berupa taman, baik yang terdapat didalam kompleks perumahan maupun dalam kompleks perkantoran swasta/pemerintah. Untuk jenis RTH yang berupa lapangan juga dapat diidentifikasi pada beberapa lokasi di

beberapa kecamatan di Kota Makassar, dan umumnya terdapat di areal kompleks perumahan dan perkantoran swasta/pemerintah.

Tabel 1.4
Rangkuman Hasil Identifikasi RTH Kota Makassar Tahun 2016⁸⁵

NO	KECAMATAN	LUAS KECAMATAN (Ha)	LUAS RTH (Ha)	PERSENTASE (%)
1	Biringkanaya	3.163,81	269,14	1,540
2	Bontoala	147,58	6,31	0,036
3	Makassar	251,06	8,73	0,050
4	Mamajang	241,48	6,89	0,039
5	Manggala	2.302,23	68,02	0,389
6	Mariso	228,44	10,34	0,059
7	Panakkukang	1.414,17	80,02	0,458
8	Rappocini	1.207,32	30,11	0,172
9	Tallo	903,40	392,60	0,247
10	Tamalanrea	4.312,68	218,65	1,251
11	Tamalate	2.627,40	207,39	1,187
12	Ujung Pandang	282,64	15,89	0,091
13	Ujung Tanah	189,70	9,26	0,053
14	Wajo	204,11	1,96	0,011
Total		17. 476.01	1.325.30	7, 584

Dari tabel di atas, didapatkan luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar sebesar 1.325,30 Ha dengan persentase 7,584%. Untuk luasan RTH yang tertinggi adalah di kecamatan Tallo seluas 392,60 Ha dengan persentase 2,247% dan yang terendah adalah di kecamatan Wajo seluas 1,94 Ha dengan persentase 0,011%.

Melihat fakta yang ada di atas bahwa keberadaan RTH yang jauh dari proporsi ideal, persentase dari jumlah RTH yang ada di kota Makassar yang hanya 7, 584 % dari luas wilayah kota Makassar berbanding terbalik dengan target yang ditetapkan dalam undang-undang RTH. Hal ini tentunya

⁸⁵Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Laporan kajian identifikasi pengendalian dan pemantauan RTH, h. 111.

dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya tingginya kebutuhan lahan perumahan karena pertumbuhan penduduk yang begitu pesat mempengaruhi keberadaan RTH semakin terpinggirkan bahkan diabaikan fungsi dan manfaatnya. Perangkat hukum mengatur penataan ruang hendaknya diimplementasikan dengan baik oleh pengambil keputusan. Pemerintah harus konsisten dalam menjalankan penataan ruang. Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang. UU Penataan Ruang yang memuat sanksi dapat digunakan sebagai payung hukum untuk memenuhi kebutuhan RTH.

Pemerintah seharusnya mampu menyediakan RTH bagi masyarakat sehingga memberikan kenyamanan karena lingkungannya yang berkualitas. Identifikasi ketersediaan RTH perlu dilakukan sehingga pemerintah mengetahui ketersediaan RTH sebagai salah satu bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH. RTH sebagai komponen ruang yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas maupun kuantitas harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota agar tercipta kota berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pada kenyataannya kondisi lingkungan Kota Makassar sangat memperhatikan. Pesatnya pembangunan gedung dan meningkatnya aktivitas manusia membuat RTH di kota Makassar cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar membuat keberadaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) semakin berkurang dan berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan.

Oleh karena itu, sudah seharusnya penambahan RTH baru ditambah oleh pemerintah kota Makassar demi menjaga keseimbangan lingkungan mengingat masih kurangnya RTH di kota Makassar. Namun dalam hal ini pemerintah masih terkendala baik dari segi anggaran maupun pembebasan lahan yang cocok untuk RTH, hal ini sesuai yang dikatakan Novi Narillah dalam wawancara kami di kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar.

“Jumlah RTH di Kota Makassar memang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan aturan yang ada, dari 30% yang tersedia hanya 7,584%. Untuk penambahan lahan khusus RTH kami masih kesulitan dianggaran karena untuk pengadaan lahan sendiri itu butuh anggaran yang besar, meskipun memang kita akui ada beberapa lokasi yang seharusnya jadi ruang yang terbuka dan sangat cocok untuk lahan serapan, akan tetapi dari sipemilik tanah pun belum tentu mau menjualnya, selain masih banyak pengembang belum memberikan RTH yang telah ditetapkan dalam setiap izin bangunanya”.⁸⁶

Selain kendala di atas juga karena adanya kepentingan pasar, seperti diketahui pesatnya reklamasi pantai berperan dalam kerusakan lingkungan, banyak wilayah yang seharusnya jadi RTH akan tetapi kemudian pemerintah memberikan izin para pengembang untuk membangun berbagai bangunan untuk kepentingan ekonomi, ada banyak kawasan hijau di beberapa kawasan pantai hijau kemudian berubah menjadi kawasan pembangunan diantaranya pantai yang ada di daerah Mariso dengan pembangunan perumahan dan untia pembangunan pelabuhan. Hal ini dipaparkan oleh Direktur Walhi kota Makassar.

⁸⁶ Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017.

“Kerusakan lingkungan sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh para pengembang akan tetapi Pemerintah dan masyarakat juga berperan dalam kerusakan tersebut. salah satu contohnya adalah pemerintah memberikan izin para pengembang dalam proses reklamasi pantai yang seharusnya menjadi RTH seperti yang terjadi di Mariso dan di Untia”.⁸⁷

Dalam rangka meningkatkan jumlah RTH di Kota Makassar sering kali pemerintah kurang memperhatikan perizinan yang dikeluarkan. Disisi lain misalnya pemerintah menginginkan peningkatan RTH di Kota Makassar akan tetapi memberi izin seluas-luasnya kepada pengembang untuk membangun gedung, industri, atau reklamasi pantai tanpa ada pengawasan yang ketat. Selain itu pemerintah juga kurang memberdayakan masyarakat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan RTH.

Peran pemerintah dalam meningkatkan jumlah RTH terkadang tidak mampu mengatasi persoalan RTH. Karena keberpihakan pemerintah terhadap para pemodal. Hal ini seperti yang dikatakan Gramsci bahwa fungsi Negara/ Pemerintah sebagai pelindung kepentingan para pemodal, tidak hanya dengan kekerasan tapi juga dengan bantuan para intelektual tradisional, untuk membangun persetujuan, yakni membangun suatu ideologi, hegemoni, yang dihayati oleh rakyat.

Kurangnya apresiasi akan pentingnya RTH, inkonsistensi implementasi kebijakan dan strategi Tata Ruang Kota Makassar yang sudah ditetapkan dalam Rencana Induk Kota, serta lemahnya fungsi pengawasan (kontrol) dalam pelaksanaan pembangunan kota menyebabkan kuantitas dan

⁸⁷ Asmar Ekswar, Direktur Walhi Sul-Sel, Wawancara di Kantor Walhi Tanggal 09 Februari 2018.

kualitas RTH semakin berkurang. Nilai ekonomi vs nilai ekologis, keterbatasan luas lahan akibat benturan kepentingan dalam fenomena pembangunan perkotaan, lebih ditekankan pada pentingnya pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan yang dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja (atau demi kepentingan ekonomi jangka pendek). Kondisi inilah menyebabkan masyarakat Kota Makassar kehilangan ruang alternatif untuk mengisi waktu luang. Ruang waktu luang yang murah, bahkan tidak memakai biaya, yang berada di kota sebagai bagian dari tumbuhnya komunitas urban sudah hilang.

Perubahan ruang kota, seiring meluasnya imperatif ekonomi ini, akhirnya berimbas dari apa yang dikatakan Lefebvre sebagai perubahan representasi ruang. Yaitu ruang yang dikonsepsikan oleh elit-elit sosial. Representasi ruang adalah ciptaan kelompok dominan. Kelompok dominan yang dimaksud adalah para penguasa politik dan penguasa ekonomi. Seperti dalam kasus perubahan representasi ruang dalam 'ruang' lapangan karabosi di Makassar dari representasi ruang publik menjadi representasi ruang komersial yang dimiliki oleh para pemodal.⁸⁸ Selain itu juga banyak contoh yang bisa kita lihat di Makassar seperti reklamasi pantai yang dimana awalnya digunakan oleh para nelayan kemudian dikomersilkan menjadi bangunan-bangunan yang megah.

Peran pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam menjaga keseimbangan lingkungan tentunya sangat dibutuhkan dalam menanggapi

⁸⁸ Muhammad Ridha, *Sosiologi Waktu Senggang: Eksploitasi dan Komodifikasi Perempuan di Mal*, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), h. 38.

persoalan lingkungan. Disini peran pemerintah dalam menanggapi keperihatinan masyarakat dan institusi lain dari masyarakat atas persoalan lingkungan seharusnya ditindak-lanjuti dengan menegakkan peraturan untuk pengendalian dampak lingkungan maupun mengendalikan atau menindak perusahaan yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan. Tindakan ini dapat diklasifikasi sebagai tindakan disinsentif karena memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar aturan namun bisa berdampak positif bagi lingkungan. Pemerintah dapat menindak sebagai salah satu bentuk tindakan hukum namun juga dapat memberikan insentif untuk mendorong masyarakat atau swasta untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Meski tidak mudah, Ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan sebagai pemilik dominasi kontrol dalam wilayahnya. Karena dalam meningkatkan jumlah luasan RTH Kota Makassar ada banyak kendala yang sering ditemui baik dari segi anggaran, kepentingan pasar, maupun ketidakdisiplinan para pengembang dalam menyiapkan RTH yang telah ditetapkan dalam perizinan pembangunan. Melihat hal ini dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam mengawasi para pengembang dan juga konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan RTH ini di antaranya membuat target ataupun

pengalokasian dana khusus setiap tahunnya, seperti yang dikatakan direktur WALHI kota Makassar.

“Memang sulit mengembangkan RTH di kota Makassar menjadi 30 % sekaligus akan tetapi pemerintah bisa mengembangkan dengan cara evaluasi jumlah RTH setiap tahunnya serta membuat target RTH setiap tahunnya yang harus dicapai itu bisa disesuaikan dengan jumlah pertumbuhan penduduk, selain itu pemerintah harus lebih serius dalam pengadaan RTH baru dengan mengalokasikan dana setiap tahunnya”⁸⁹

Selain cara diatas ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menata dan juga mengelolah RTH dikota Makassar diantaranya, sosialisasi, konsisten dalam mengimplementasikan aturan yang sudah ditetapkan dan membuat sangsi yang tegas terhadap pelanggar peraturan RTH.

Selain itu juga perlu adanya pengembangan dampak positif dan pencegahan terjadinya dampak negatif, pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan pendekatan sosial ekonomi, kelembagaan, dan teknologi. Pada prinsipnya, pendekatan sosial ekonomi menjeaskan aspek sosial ekonomi, pendekatan kelembagaan menentukan lembaga yang terkait dan pendekatan teknologi menguraikan pilihan teknologi yang pengendalian dampak lingkungan hidup.⁹⁰

Dalam mengelolaha dan menata RTH sengan penting adanya pengawasan bagi seluruh pengembang demi menjaga keseimbangan lingkungan, pengawasan ini bisa langsung dilakukan oleh dinas tata ruang dan banguna, badan lingkungan hidup dan juga seluruh masyarakat.

⁸⁹ Asmar Ekswar, Direktur Walhi Sul-Sel, Wawancara di Kantor Walhi Tanggal 09 Februari 2018.

⁹⁰ K.E.S. Manik. *Pengelolaan lingkungan hidup*. h. 68.

Pengawasan ini bertujuan untuk mempertahankan RTH yang sudah ada sekaligus menagi RTH yang disiapkan oleh para pengembang dari setiap bangunan yang ada.

“Pengawasan sangat penting dalam pengelolaan dan penataan RTH mengingat banyak pengembang yang kadang tidak mengikuti aturan yang telah ada. Para pengembang sudah seharusnya memberikan RTH yang sudah tertera dalam izin pembangunan. Selain itu pengawasan juga penting untuk menjaga dan merawat RTH yang sudah ada”.⁹¹

Badan Lingkungan hidup bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang dan Wilayah sudah dalam mengawasi para pengembang ataupun aktifitas masyarakat yang berpotensi merusak atau mengurangi RTH yang ada. Namun ada beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak begitu maksimal diantaranya kurangnya tim pengawas, dan tidak adanya aturan ketat bagi pengembang yang tidak mengalokasikan sebagian wilayah yang dibangunnya sebagai ruang terbuka hijau. Seperti yang dikatakan oleh Lenni hastillah, ST. MT dalam wawancara kami di kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan.

“Dalam pengawasan memang kami akui masih sangat minim karena kami masih kekurangan anggota dalam tim pengawas.”⁹²

Selain kekurangan anggota juga belum adanya aturan yang mengatur sangsi apa saja yang bisa diberikan bagi pengembang atau siapa saja yang melanggar aturan tentang RTH..

⁹¹ Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017.

⁹² Lenni Hastillah, ST. MT, Kepala Seksi Perencanaan Dan Desain Bangunan, Wawancara Di Kantor Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Makassar Tanggal 24 Oktober 2017.

“Keterbatasan bagi kami dalam mengawasi itu belum ada aturan yang tegas mengenai pelanggaran RTH khususnya bagi pengembang”.⁹³

Dalam mengawasi keberadaan RTH tentunya sangat diperlukan aturan yang mengatur sanksi bagi pelanggar agar disiplin dalam mengembangkan pembangunan yang ada juga menjaga RTH yang sudah ada. Selain aturan mengenai sanksi tentu penting adanya sosialisasi baik kepada aparat pemerintahan juga kepada seluruh lapisan masyarakat agar tercipta kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana menyiapkan *roof garden* dan *vertical garden* bagi masyarakat yang ingin membangun rumah baru.

“Dalam peningkatan ruang terbuka hijau khususnya pembangunan rumah itu diwajibkan untuk menyiapkan *roof garden* atau *vertical garden* yang artinya setiap bangunan harus memiliki taman hijau baik halaman rumah maupun di atas rumah”.⁹⁴

Dalam meningkatkan kualitas RTH yang ada diadakan revitalisasi taman dan penanaman pohon serta penggantian pohon-pohon yang sudah diperkirakan akan roboh, hal ini juga diawasi oleh pemerintah apabila ada penebangan ataupun kerusakan taman, dan hutan kota.

“Untuk sekarang kami hanya fokus untuk mengelolah RTH yang ada seperti taman, hutan kota dan sebagainya, penanaman pohon dan pelestarian taman kota.”⁹⁵

Revitalisasi sudah dilakukan dan juga penanaman pohon di beberapa RTH yang ada, selain itu dilakukan penggantian pohon-pohon yang

⁹³ Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017.

⁹⁴ Lenni Hastillah, ST. MT, Kepala Seksi Perencanaan Dan Desain Bangunan, Wawancara Di Kantor Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Makassar Tanggal 24 Oktober 2017.

⁹⁵ Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017.

diperhitungkan tidak mampu bertahan lama atau sudah mau roboh, diadakan penanaman bunga dan pengadaan pot disepanjang jalan yang ada di Kota Makassar. Berbagai usaha yang sudah dilakukan demi terpenuhinya RTH, namun masih jauh dari kata cukup. Saat ini, luas RTH Kota Makassar baru mencapai 7,584 persen yang berarti masih kurang 20, 416%, mengingat untuk target RTH 30%. Pemerintah Kota Makassar hanya mampu menyediakan sebesar 7,584% saja. Dari ketersediaan RTH di kota Makassar tentunya berdampak bagi kondisi lingkungan Kota Makassar seperti yang disebutkan oleh Novi Narilla.

“Ada beberapa dampak dari kurangnya RTH di kota Makassar di antaranya rentang terjadi banjir, menurunnya ketersediaan air tanah, meningkatnya polusi udara dan suhu kota yang berakibat pada munculnya berbagai penyakit baru.”⁹⁶

Geliatnya pertumbuhan bangunan di Kota Makassar yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah ruang-ruang hijau bagi masyarakat melainkan pembangunan gedung yang terus menerus dengan tidak disertai pembangunan kawasan hijau, menyebabkan kota Makassar semakin dipenuhi dengan bebatuan yang menjulang tinggi tanpa ada yang mengimbangi dengan lingkungan yang hijau. Lingkungan semakin dipenuhi dengan beton-beton yang hanya dibangun demi kepentingan dan keuntungan pasar, tanpa melihat kebutuhan masyarakat akan ruang-ruang hijau yang dapat dijadikan tempat melepaskan kepenatan hiruk pikuk kehidupan kota.

Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah zat-zat pencemar dengan berkurangnya RTH perkotaan memicu banyak permasalahan sehingga

⁹⁶Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH, Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 26 Oktober 2017.

menurunkan kenyamanan dan merusak ekologi perkotaan, seperti banjir, menurunnya ketersediaan air tanah, meningkatnya polusi udara dan suhu kota yang berakibat pada ketidaknyamanan beraktifitas dan munculnya berbagai penyakit baru.

Selain fungsi ekologis yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota, fungsi RTH lain seperti sosial, ekonomi, dan arsitektural juga sangat penting dijadikan sebuah pertimbangan dalam pengembangan RTH. Dari fungsi sosial sendiri RTH merupakan keharusan di Kota Makassar yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat masyarakat bertemu, berkumpul dan berinteraksi baik kepentingan keagamaan, perdagangan maupun membangun pemerintahan.

Perkembangan kota Makassar yang semakin moderen dan dicanangkan sebagai Kota Dunia makin memperluas fungsi dan peranan RTH khususnya publik sebagai tempat yang memungkinkan setiap warga tanpa diskriminasi dapat berinteraksi dan bertemu dengan kesederajatan dan yang lebih penting memiliki akses untuk menggunakannya.

Ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai fungsi kultural, sosial dan ekonomi biasanya memanfaatkan RTH publik seperti taman, kebun, jalur hijau, lapangan olahraga dan semua ruang komunal yang berada diluar bangunan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam tingkatan Administratif Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah direspon oleh pemerintah kota Makassar dengan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar diatur dalam Peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta Peraturan walikota Makassar No. 69 tahun 2016 tentang izin pemanfaatan penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar, namun dalam tingkatan implementasi ketersediaan Ruang terbuka hijau di kota Makassar masih sangat minim. Hal ini, dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan angka 7,584% dari 30% yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. fenomena Ruang Terbuka Hijau ini belum terlaksana baik dari segi pelaksanaan dan pembangunan hingga saat sekarang, Kurangnya RTH di Kota Makassar tak lepas dari kurangnya perhatian pemerintah dalam mewujudkan 30% RTH di Kota Makassar.

Melihat hal ini tentunya dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tentang RTH untuk menjaga keseimbangan kota yang semakin padat. RTH yang menjadi paru-paru kota tentunya diharapkan mampu berfungsi sebagai ekologi, sosial maupun estetika sehingga kita bisa lebih nyaman beraktifitas.

2. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah dalam mewujudkan jumlah ketersediaan RTH Sebagaimana yang diatur Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seharusnya pemerintah kota Makassar menjadikan Peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta Peraturan walikota Makassar No. 69 tahun 2016 tentang izin pemanfaatan penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar dalam mengelolah RTH.

Pemerintah juga seharusnya lebih aktif dalam mensosialisasikan RTH itu sendiri baik dari segi fungsi maupun dari segi manfaat agar terjalin kerjasama antara masyarakat maupun swasta dalam mengembangkan dan mengelolah RTH.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemhan*, Bandung :CV. Penerbit J-ART, 2004.
- Budiardjo, Miryam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramadia Pustaka Utama, 2008.
- Ritzer, George dan J Goodman,Douglas. *Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*. Yogyakarta: kreasi wacana, 2004.
- Jamaluddin, Jahid. *Ruang Public dan Resolusi Konflik*, Makassar:Alauddin University Pers.
- Kuncoro, Burhan. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Kuncoro, Mudrarajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Cet. III; Jakarta: Erlangga 2009.
- K.E.S. Manik. *Pengelolaan lingkungan hidup*. Cet. ke-1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Lisa, Harrison. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mokoginta f Lukman. *Bumi Bukan Milik Kapitalis*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan,2009.
- Mitchell Bruce, dkk, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 2000.
- Mulanto. *Ilmu lingkungan*. Yogyakarta; Graha 2007.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik, Berbasis Analisis Bukti, Untuk Pelayanan Publik*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2016.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, an Evaluasi*. Jakarta :Elex Media Komputindo, 2004.
- Ridha, Muhammad. *Sosiologo Waktu Senggang: Eksploitasi dan Komodifikasi Perempuan di Mal*, Yogyakarta: Resist Book, 2011.
- Sadyontomo, Muliono. *Menejemen kota dan wilawah*. Jakarta: Bumi Aksara 2009.
- Siregar, Sofyan. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Cet. III; Jakarta : Rajawali Pers,2012.

- Solihin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implemntasi Kebijakasaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Shahihul Bukhari jilid 3. 1415 H. Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari. Darul Fikr: Bairut, Libanon.
- Afdhaliah, K, Usman. 2017. "*Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perumahan Padat Pendudukdi Kota Makassar*", Skripsi, Makassar: Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- Hidayat, Kiki. 2014. "*Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014*".Skripsi. Fakultas Keguruab dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Hilda Lelya, "*Islam dan Lingkiungan Hidup*". Islam, Lingkungan, Hidup, penyakit (2013)
- Marbun, Banga, Arya. 2007. "*Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pendukung Sarana Olahraga Di Perkotaan*",Skripsi, Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesi.
- Mukafi Achmad. 2013. "*Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Kudus*", Skripsi, Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Randi, Ruslan. 2017. "*Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene*", Skripsi, Makassar: Fakultas Ilmi Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasanuddin.
- Ruslan, Randi. 2017. "*Analisis Tata Kelolah Ruang Terbuka Hjau terhadap pembangunan Kota di Kabupaten Majene*". Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Suparjo, Nopitasari. 2016. "*Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar*", Skripsi, Makassar: Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Foto Wawancara Bersama Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



2. Aswar Exwa, Direktur Walhi Sul-Sel,



3. Lenni Hastillah, ST. MT, Kepala Seksi Perencanaan Dan Desain Bangunan,



4. Pengenalan Peta RTH di Dinas Tata Ruang dan Bangunan



Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemhan*, Bandung :CV. Penerbit J-ART, 2004.
- Budiardjo, Miryam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramadia Pustaka Utama, 2008.
- Ritzer, George dan J Goodman,Douglas. *Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*. Yogyakarta: kreasi wacana, 2004.
- Jamaluddin, Jahid. *Ruang Public dan Resolusi Konflik*, Makassar:Alauddin University Pers.
- Kuncoro, Burhan. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Kuncoro, Mudrarajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Cet. III; Jakarta: Erlangga 2009.
- K.E.S. Manik. *Pengelolaan lingkungan hidup*. Cet. ke-1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Lisa, Harrison. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mokoginta f Lukman. *Bumi Bukan Milik Kapitalis*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan,2009.
- Mitchell Bruce, dkk, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2000.
- Mulanto. *Ilmu lingkungan*. Yogyakarta; Graha 2007.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik, Berbasis Analisis Bukti, Untuk Pelayanan Publik*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2016.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, an Evaluasi*. Jakarta :Elex Media Komputindo, 2004.
- Ridha, Muhammad. *Sosiologo Waktu Senggang: Eksploitasi dan Komodifikasi Perempuan di Mal*, Yogyakarta: Resist Book, 2011.
- Sadyontomo, Muliono. *Menejemen kota dan wilawah*. Jakarta: Bumi Aksara 2009.
- Siregar, Sofyan. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Cet. III; Jakarta : Rajawali Pers,2012.

- Solihin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implemntasi Kebijakasaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Shahihul Bukhari jilid 3. 1415 H. Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari. Darul Fikr: Bairut, Libanon.
- Afdhaliah, K, Usman. 2017. "*Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perumahan Padat Pendudukdi Kota Makassar*", Skripsi, Makassar: Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- Hidayat, Kiki. 2014. "*Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014*".Skripsi. Fakultas Keguruab dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Hilda Lelya, "*Islam dan Lingkiungan Hidup*". Islam, Lingkungan, Hidup, penyakit (2013)
- Marbun, Banga, Arya. 2007. "*Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pendukung Sarana Olahraga Di Perkotaan*",Skripsi, Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesi.
- Mukafi Achmad. 2013. "*Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Kudus*", Skripsi, Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Randi, Ruslan. 2017. "*Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene*", Skripsi, Makassar: Fakultas Ilmi Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasanuddin.
- Ruslan, Randi. 2017. "*Analisis Tata Kelolah Ruang Terbuka Hjau terhadap pembangunan Kota di Kabupaten Majene*". Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Suparjo, Nopitasari. 2016. "*Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar*", Skripsi, Makassar: Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Foto Wawancara Bersama Novi Narilla, SP. Msi., Kepala seksi pengendalian dan kemitraan RTH.



2. Aswar Exwa, Direktur Walhi Sul-Sel,



3. Lenni Hastillah, ST. MT, Kepala Seksi Perencanaan Dan Desain Bangunan,



4. Pengenalan Peta RTH di Dinas Tata Ruang dan Bangunan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Usman Ali, lahir di Dusun Kanang-Kanang, Desa Tino Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto pada tanggal 14 April 1995 dari pasangan suami istri Muh. Ali dan Hasna. Merupakan anak Kedua dari empat bersaudara. Pertama kali melangkah kaki ke dunia pendidikan pada tahun 1998 di SDN 143 Korong di Dusun Korong tahun 2001 - 2007. Kemudian melanjutkan ke tingkat pendidikan MTs DDI Mattoanging Bantaeng tahun 2007 - 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMAN 1 Bantaeng tahun 2010 - 2013. Kemudian setelah tamat penulis memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai tempat menuntut ilmu dengan memilih jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, terhitung mulai tahun 2013 - 2018.